

**POLITIK ISLAM KEBANGSAAN
(ANALISIS TERHADAP MATERI PERKADERAN IPPNU KOTA
MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas
dan Melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Islam**

OLEH:

**WIDYA UTAMI
0404163028**

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM



FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2020

PENGESAHAN

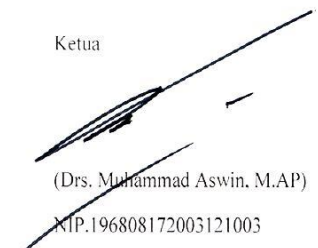
Skripsi berjudul "POLITIK ISLAM KEBANGSAAN (ANALISIS MATERI PERKADERAN IPPNU KOTA MEDAN)" an. WIDYA UTAMI, NIM 0404163028, Program Studi Pemikiran Politik Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Sarjana (S-1) Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 13 November 2020.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.


Medan, 13 November 2020

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
PROGRAM SARJANA (S-1) FAK.
USHULUDDIN DAN STUDI ISLAM UIN
SUMATERA UTARA MEDAN

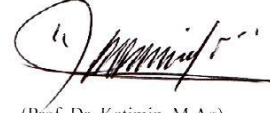
Ketua


(Drs. Muhammad Aswin, M.AP)

NIP. 196808172003121003



(Drs. Kamaluddin, M.A)

NIP. 195907021986031006


(Prof. Dr. Katimin, M.Ag)

NIP. 196507051993031003

Sekretaris



(Siti Ismahani, S.Ag.M.Hum)

NIP. 196905031999032003

Anggota Penguji


(Drs. Muhammad Aswin, M.AP)

NIP. 196808172003121003


(Dr. H. Arifinsyah, M.Ag)

NIP. 196809091994031004

Mengetahui :

Dekan Fak. Ushuluddin Dn Studi Islam

UIN Sumatera Utara Medan


(Prof. Dr. Katimin, M.Ag)

NIP. 196507051993031003

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

POLITIK ISLAM KEBANGSAAN

(ANALISIS TERHADAP MATERI PERKADERAN IPPNU KOTA MEDAN)

OLEH:

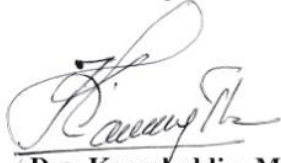
WIDYA UTAMI

NIM. 0404163028

Dapat disetujui sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Pemikiran Politik Islam.

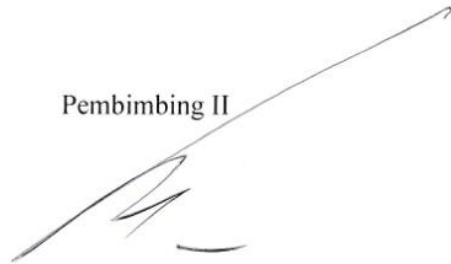
Medan, 27 Oktober 2020

Pembimbing I



Drs. Kamaluddin, M.A

Pembimbing II



Drs. Muhammad Aswin, M.Ap

SURAT PERNYATAAN

Kami Pembimbing I dan II yang ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa:

Nama : **Widya Utami**

Nim : 0404163028

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Judul Skripsi : "POLITIK ISLAM KEBANGSAAN (TERHADAP MATERI PERKADERAN IPPNU KOTA MEDAN.

Berpendapat bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat ilmiah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya dapat di Munaqosyahkan.

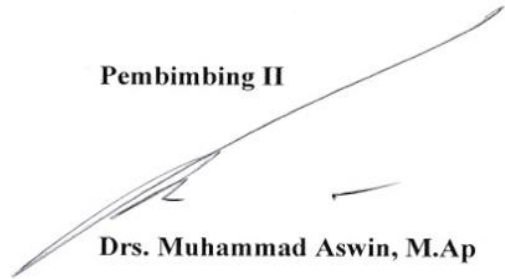
Medan, 27 Oktober 2020

Pembimbing I



Drs. Kamaluddin, M.A

Pembimbing II



Drs. Muhammad Aswin, M.Ap

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widya Utami
Nim : 0404163028
Tempat/tgl lahir : Tembung, 13 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Beringin psr VII Tembung gg. Singkong

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“POLITIK ISLAM KEBANGSAAN (ANALISIS TERHADAP MATERI PERKADERAN IPPNU KOTA MEDAN)”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, September 2020

Yang membuat pernyataan


Widya Utami



Nama : Widya Utami

Nim : 0404163028

Jurusan : Pemikiran Politik Islam

Pembimbing I : Drs. Kamaluddin, M.A

Pembimbing II : Drs. Muhammad Aswin, MAP

Judul : **“POLITIK ISLAM KEBANGSAAN
(ANALISIS TERHADAP MATERI
PERKADERAN IPPNU KOTA
MEDAN)”**.

ABSTRAK

Politik kebangsaan merupakan pandangan yang mementingkan persatuan dan kesatuan. IPPNU sebagai kader pelajar yang bakal jadi penerus bangsa harus bisa memberikan pelajaran atau pendidikan politik kepada generasi yang memasuki usia produktif yang dapat mewujudkan sikap cinta tanah air. IPPNU bisa disebut sebagai gerakan sosial anak muda pelajar puteri atau santri muslim yang memiliki semangat cinta bangsa. Keislaman dan kebangsaan sangat dipengang erat dan dijunjung tinggi. Komitmen tersebut yang dapat disebut Politik Islam Kebangsaan. Melalui perkaderan disetiap materi yang akan disampaikan materi yang menguat tentang politik kebangsaan agar menumbuhkan rasa cinta tanah air.

IPPNU memiliki peranan strategis dalam upaya memperkuat sosial politik NU di pentas nasional. Peranan itu ada pada penyiapan generasi penerus sejak dibangku sekolah atau pelajar / para kader NU muda dalam IPPNU harus bisa memahami posisinya sebagai bagian strategis dalam keluarga besar NU. Hasil konkrit dari proses ini bisa kita lihat dari materi kaderisasi disetiap tingkatannya. Mulai dari Makesta, Lakmud, Lakut, dan Latpel selalu hadir materi Aswaja dan Ke-NU-an guna untuk penguatan ideologi Islam moderat, kenegaraan dan mendekatkan Islam dengan kebangsaan, maksudnya ialah mendekati islam berdasarkan fungsi agama ini sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi alam. Pada saat kegunaan dan tujuan Islam ialah kesejahteraan rakyat, berarti segera menjadi alat untuk mendapatkan tujuan terserbut.

Kata Kunci : Politik Islam Kebangsaan, Materi Perkaderan IPPNU.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Widya Utami
2. NIM : 0404163028
3. Jurusan : Pemikiran Politik Islam
4. Tempat/tgl lahir : Tembung, 13 Mei 2020
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jalan Beringin psr VII Tembung gg.
Singkong

II. JENJANG PENDIDIKAN

1. SD SWASTA SABILINA TEMBUNG : Tahun 2004
2. SMP NEGERI 29 MEDAN : Tahun 2010
3. SMA NEGERI 8 MEDAN : Tahun 2013
4. Mahasiswa FUSI : Tahun 2016

III. PRESTASI

1. Pengurus PMII Rayon FUSI 2019-2020
2. Pengurus Senat Mahasiswa FUSI 2019-2020
3. Ketua IPPNU Kota Medan periode 2018-2020

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diharapkan. Shalawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Aamiin.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat dan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada program S-1 untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada pada Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Adapun judul Skripsi adalah **“Politik Islam Kebangsaan (Analisis terhadap Materi Perkaderan IPPNU Kota Medan)”**. Sebagaimana layaknya manusia, tidak pernah luput dari kelemahan dan kekurangannya. Demikian juga halnya penulis skripsi ini. Dalam usaha menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyaknya kesulitan dan tantangan yang dihadapi, namun berkat rahmatnya Allah SWT, ridhonya orang tua, serta dukungan arahan dan bimbingan dari beberapa pihak, maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktunya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Orangtua saya tercinta, yaiktu Bapak Syafar dianto dan Ibu Risnawati tak lupa anakmu berterima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan moral maupun material, memberi kasih sayang dan pengorbanan tanpa pamrih. Semoga mamak dan bapak sehat selalu dan semoga Allah SWT membalas kebaikan mamak dan bapak.
2. Untuk saudaraku sekandung satu-satunya yaitu bang Fariz Andani yang selalu menanyakan kapan wisuda, bukan nanyak seputar skripsi.
3. Begitu juga kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman Harahap, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan bagi penulis dalam mengikuti dan menjalankan perkuliahan ini sampai menyangang gelar sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi, Bapak/Ibu Pembantu Dekan I,II,III, para Dosen dan seluruh karyawan Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Kamaluddin, MA, selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak membimbing dan memberi kemudahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Muhammad Aswin, M.Ap, selaku Pembimbing Skripsi II dan juga selaku ketua jurusan Prodi Pemikiran Politik Islam yang juga begitu banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terkhusus untuk Staf Bawaslu Deli Serdang, Ikhsan Faisal Angkat, S.Sos yang sekarang sedang menjalani program S2 nya, yang sudah menemani ku 2 tahun belakangan ini, terimakasih sudah banyak memberikan suport dan dukungan terbaik untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tepat waktu. Semoga Allah membalas semua kebaikan abang selama ini, aamiin.
8. Untuk Ketua Rayon PMII Ushuluddin dan Studi Islam sahabat Muhammad Yusuf Zailani Dalimunthe beserta jajarannya dan seluruh keluarga besar Warga dan Kader PMII FUSI yang sering memberikan suport terbaik.
9. Untuk sahabat seperjuangannya di kelas, terkhusus Kader PMII yaitu Anita Zam'arini, Muhammad Yusuf Zailani Dalimunthe, Muhammad Ishak, Haviz Azpriadha Pulungan ketua SENAT FUSI, Mahfud Al-hadi, Wan Fahmi Putra, Alfazri.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan karya ilmiah ini yang jauh dari kesempurnaan, dan penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan umumnya kepada pembaca.

Aamin ya Robb....

Wallahulmuafiq Illa aqwamithoriq

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2020

Penulis

Widya Utami
NIM. 0404163028

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Batas Istilah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Kajian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
 BAB II : POLITIK ISLAM KEBANGSAAN	
A. Wawasan Kebangsaan	
1. Pengertian.....	16
2. Makna wawasan kebangsaan.....	19
3. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan.....	20
B. Pengkaderan (Kaderisasi)	
1. Pengertian.....	20

2. Pengkaderan (kaderisasi) perspektif Islam.....	22
C. Pendapat Tokoh terkait Politik Islam Kebangsaan	
1. Menurut Abdurrahman Wahid	25
2. Menurut Hasyim Muzadi	32
3. Menurut Umroh Mahfudzoh	34

BAB III : PROFIL, SEJARAH, PERKEMBANGAN IPPNU, SERTA MATERI PERKADERAN IPPNU.

A. Profil IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama)	
1. Latar belakang berdirinya IPPNU	36
2. Aqidah, Asas dan Kedaulatan IPPNU	37
3. Visi dan Misi IPPNU	41
4. Struktur organisasi IPPNU	41
5. Lambang Organisasi IPPNU	
a. Bentuk dan Isi.....	42
b. Arti Lambang Organisasi	43
6. Mars IPPNU	44
7. Jenis Pengkaderan IPPNU	45
8. Skema Kaderisasi IPPNU	46
B. Sejarah IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama)	47
C. Perkembangan IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama)	
Kota Medan.....	59

BAB IV : POLITIK ISLAM KEBANGSAAN

(ANALISIS MATERI PERKADERAN IPPNU DI KOTA MEDAN)

- A. Bagaimana Motivasi Penyusunan Materi Perkaderan IPPNU 54
- B. Corak Politik Kebangsaan dalam Materi Perkaderan IPPNU 62

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sistem politik menunjukkan kemajuan yang cukup berarti bagi masyarakat. Politik itu adalah cara atau keahlian seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk memperoleh jabatan. Berbagai macam gambaran ideologi politik di lingkup muslim, adalah sesuatu yang sudah tidak dapat dihindari lagi. Islam dan demokrasi sering dipermasalahkan oleh kelompok muslim, hal ini dibantu oleh cara pandang moderat yang diterima muslim di Indonesia. Oleh karena itu harus dimengerti bermacam bentuk ideologi politik dikalangan muslim. *Politik islam* itu sendiri, sebuah gambaran yang pasti giat memperjuangkan aturan bernegara di bawah panji Islam, umat Islam sebagai mayoritas dalam tubuh bangsa indonesia. *Politik Kebangsaan* gambaran politik yang diakui tidak mempunyai landasan dalam agama, hal ini diakibatkan oleh cara pandang doktrin.

Politik kebangsaan merupakan pandangan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, daripada mengutamakan kekuasaan dari beberapa golongan. Berbicara soal politik kebangsaan secara mendasar bahwa platform ini mengutamakan visi politik yang mempunyai proposisi pada keindonesia an, kemanusiaan dan keadilan bagi setiap golongan serta menjadi penting posisinya untuk dihidupkan dan diimplementasikan kembali. Yang menjadi pemicu utama dari situasi tersebut ialah hilangnya marwah politik kebangsaan, yang mulai luntur perlahan digantikan dengan politik pragmatis dengan orientasi kekuasaan, serta kepentingan segelintir golongan yang hanya mementingkan golongan saja. Dalam

aspek politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin, serta pandangan kebhinekaan yang utuh.

Hubungan antara Islam dan negara, masih menjadi isu yang sangat kontroversial. Salah satu sisi perdebatan ialah adanya pembedaan yang seringkali dibuat menyangkut nilai-nilai di satu sisi dan teknik pada lain sisi. Teknik-teknik dinyatakan bersifat netral dari sudut pandang agama dan moral. Yang berarti pula bisa diambil dan diadopsi dari masyarakat Barat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai Islam yang utuh dan tidak disenyelewengkan. Kenyataan yang melahirkan sikap modernisasi, suatu sikap yang dilahirkan dari asumsi, bahwa tidak semua ajaran dalam politik atau demokrasi bertentangan secara diametral, melainkan ada kesejajaran dengan Islam dalam pelaksanaan yang bersifat teknis.¹ Umat Islam sebagai mayoritas pendiri Indonesia, memiliki modal sosial dan modal politik yang strategis. Mengingat para pendiri dari lingkungan ulama adalah menyokong utama republik, dan berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan, maupun mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Madrasah Aliyah sebagai salah satu tempat pendidikan resmi di Indonesia yang bernafaskan Islam, sehingga memiliki kurikulum yang mencakup muatan politik atau pendidikan politik. Di era zaman sekarang inilah remaja remaja seperti ini yang dibutuhkan sebagai penerus bangsa dan negara, serta bisa memainkan peran dalam mempertahankan islamisme.

¹ Muhammad, Nur, *Islam Berbicara Tentang Cita-Cita Politik Indonesia Baru*, dalam Jurnal *Asy-Syir'ah*, Vol. 26, No.1, 2002, h. 110

Latar belakang berdirinya Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama diawali pada kelahiran pada tanggal 2 Maret 1955, di Kota Malang dan salah satu pendirinya yaitu bernama Ibunda Umroh Mahfudhoh. Organisasi tersebut didirikan untuk melaksanakan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja puteri. Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dikonsentrasikan untuk membimbing dan membina remaja puteri NU yang masih duduk dibangku sekolah atau madrasah, serta santri yang berstatus setingkat dengan sekolah atau madrasah tersebut. Di usia emas mereka seperti ini berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang khidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1955 IPPNU sempat disalah artikan dan disebut sebagai gerakan yang membias pada politik praktis, dan pada tahun 2003 organisasi IPPNU memperjelas bahwa wadah perjuangan IPPNU yaitu pelajar puteri yang mengawal visi intelektual kepelatihan. IPPNU memiliki sifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Setiap organisasi sangat penting bagi kita yang nanti hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat dibutuhkan pengalaman organisasi yang perlu dijalani dan Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) sudah menyiapkan bekal untuk hidup bermasyarakat.

IPPNU bisa menjadi organisasi yang bisa memberikan pengaruh yang tepat dan berguna untuk masa depan bangsa, khususnya kepada pelajar atau santri di Indonesi. Di era zaman sekarang pelajar puteri atau santri sudah saatnya menjawab tantangan zaman, mengawal pelajar Indonesia. Generasi muda NU khususnya Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) harus menjadi garda terdepan untuk membela bangsa dan negara. Generasi muda NU mencintai negara sebagian dari iman atau Hubbul Wathan Minal Iman.

IPPNU bisa disebut sebagai gerakan sosial anak muda pelajar puteri atau santri muslim yang memiliki semangat cinta bangsa. Keislaman dan kebangsaan sangat dipengang erat dan dijunjung tinggi. Komitmen tersebut yang dapat disebut Politik Islam Kebangsaan. Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di dirikan atas dasar keinginan atau kemauan sebagai tempat aktivitas sosial yang bertandakan amal keagamaan sebagai pencegahan munculnya keadaan sosial yang terjadi.

IPPNU sebagai tempat pengkaderan puteri atau santri NU agar searah pada posisi yang diinginkan, sehingga nilai nilai NU yang berazaskan aswaja bisa tetap terjaga kermurniannya. Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah adalah faham paham yang mayoritas pengamutnya oleh masyarakat muslim di Indonesia. Aswaja yang di kalangan NU, didudukkan sebagai manhaj al-fikr memiliki platform politik.

Musyawahar membahas ad/art IPPNU yang ke 16 tahun 2009 di Jawa Tengah telah memberikan pengakuan IPPNU untuk kembali pada asalnya, yaitu balik ke pelajar melalui perubahan sebutan IPPNU dari Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama menjadi Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama. Dampak logis yang dirasakan dari hasil kongres tersebut adalah penataan infrastruktur dan infrastruktur kader IPPNU dalam melahirkan, membangun, membina, dan membentuk kader pada semua tahap kebutuhan serta mutu SDM yang dimilikinya. IPPNU sebagai badan otonom bidang pelajar dan santri dituntut untuk mewujudkan kader-kader Nuyang menjunjung tinggi nilai aswaja. Inilah tantangan zaman yang harus dihadapi dengan cerdas. Untuk meningkatkan

wawasan kebangsaan dan kengaraan. Untuk meningkatkan kualitas keberpihakan kebangsaan bagi generasi muda mampu memahami pancasila sila per sila.

Dalam musyawarah membahas ad/art tersebut menghasilkan pencapaian IPPNU dalam bidang calon anggota adalah terbentuknya kemandirian kader bagi calon anggota organisasi IPPNU. Yang diartikan dengan kemandirian tersebut adalah cara peningkatan gaya organisasi secara internal, agar tidak terlalu tergantung pada pihak lain. Pencapaian secara khusus dalam pendidikan kader adalah pada mutu kebatinan, mutu kreatif, dan mutu loyalitas.

Tujuan IPPNU, yaitu terbentuknya keutuhan pelajar Puteri Indonesia yang bertaqwa, berakhlakul karimah, pintar dan pandangan kebangsaan serta misi IPPNU, yaitu mendirikan kader NU yang bermutu, berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

IPPNU memiliki kewajiban untuk memelihara kredibilitas organisasi. Ditengah persaingan global melalui penjagaan kualitas kader. Untuk itu IPPNU perlu membangun dan melaksanakan perkaderan yang berkaitan dengan kemampuan dan pemberdayaan perempuan.²

IPPNU memiliki fungsi strategis dalam mempertahankan sosial politik NU di panggung nasional. fungsi ini ditempatkan pada penyiapan generasi penerus sejak di bangku sekolah dan pesantren. Sebagai generasi emas untuk membela bangsa dan negara, dan mampu menjawab tantangan global serta menjadi garda terdepan sebagai penerus yang masih memiliki banyak kesempatan.

² Buku Pedoman Pengkaderan IPPNU, h.3

Kader NU muda dalam IPPNU harus mampu memahami posisinya sebagai bagian strategis dalam keluarga besar NU. NU sebagai jam'iyah diniyah adalah tempat para ulama dan pengikutnya yang didirikan dengan tujuan untuk merawat, menjaga, membuka dan mengamalkan ajaran Islam yang berarah atau berpedoman kan dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah mengikuti empat mazhab. Dan mempersatukan gerakan para ulama dan pengikutnya. Yang memiliki tujuan untuk membuat kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa. Dengan demikian NU merupakan gerakan keagamaan yang memiliki tujuan untuk ikut bangkit dan mengembangkan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan, pintar, berakhlak tinggi, aktif, adil dan makmur. Nahdlatul Ulama memberikan cita-cita dan gagasan dengan beberapa ikhtiar yang diawali oleh pemikiran keagamaan yang membuat kepribadian khas NU. Inilah yang disebut dengan Khittah Nahdlatul Ulama.

Khittah Nahdlatul Ulama ialah berlandaskan untuk mempertimbangkan suatu sudut pandang, tingkah laku dan perbuatan warga Nahdlatul Ulama harus menggambarkan keadaan dalam pijakan perseorangan maupun organisasi dan dalam setiap pengambilan suatu keputusan. Landasan yang dimaksud tersebut ialah paham Aswaja yang ddiptaktekkan oleh situasi masyarakat di Indonesia.

Nahdlatul Ulama berlandaskan pada paham keagamaan yang bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah dan ijma' ulama. Kontribusi NU terhadap Tegaknya NKRI, Materi ini menjelaskan tentang pentingnya memahami peran sejarah NU dalam menegakkan keutuhan NKRI. Sejak Indonesia belum lahir tradisi dan amaliah NU sudah ada di sini. Lalu untuk memperkuatnya para tokoh NU saat itu

mendorong kita harus merdeka dan punya negara sendiri. Jadi jelas peran NU dalam mempertahankan NKRI sudah tidak diragukan lagi.

IPPNU sebagai badan otonom bidang pelajar dan santri dituntut untuk mewujudkan kader-kader NU yang menjunjung tinggi nilai-nilai Aswaja. Inilah tantangan zaman yang harus dihadapi dengan cerdas. Untuk peningkatan wawasan kebangsaan dan kenegaraan. Untuk meningkatkan kualitas keberpihakan kebangsaan bagi generasi muda mampu memahami Pancasila sila per sila.

Sebagai organisasi kader, IPPNU rela melaksanakan pencermatan dan proses terhadap dinamika tersebut. Beberapa hasil kongkrit dari proses ini adalah kegiatan untuk memproses rumusan-rumusan untuk memberikan guidance terhadap pelajar puteri dan remaja agar tidak terpengaruh terhadap zaman yang bisa menjatuhkan harga diri atau jati diri mereka. Secara internal, IPPNU sudah melakukan penataan pengkaderan dengan berbagai bentuk kebijakan dan kegiatan.

IPPNU memiliki pola pengkaderan yang disesuaikan dengan berbagai dinamika yang terjadi dan disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Pola pengkaderan tersebut masih tetap merupakan pola pengkaderan yang berbasis pada pendulangan kreativitas kader puteri dalam menghadapi dinamika kehidupan. Jenjang kaderisasi yang disepakati bersama dengan Pimpinan Wilayah yaitu MOP, MAKESTA, LAKMUD, LAKUT, dan LATPEL.

B. Rumusan Masalah.

Rumusan masalah ialah uraian dari beberapa topik dan penegasan masalah yang telah ditentukan dan disusun secara tegas dan jelas. Cakupan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana motivasi penyusunan materi Perkaderan IPPNU di Kota Medan?
2. Bagaimana corak Politik Islam Kebangsaan dalam Materi Perkaderan IPPNU di Kota Medan?

C. Batasan Istilah

a. Pengertian Politik

Dipandang dari segi etimologi, kata Politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*)³. Politik dapat dikatakan sebagai upaya atau cara seseorang untuk melibatkan orang lain guna mencapai suatu keinginan. Politik juga dikatakan sebagai usaha untuk mendapatkan jabatan atau suatu kekuasaan yang ingin dicapai.

b. Pengertian Kebangsaan

Kebangsaan adalah kerjasama hukum antara orang dan negara. Kebangsaan menyerahkan undang undang negara atas orang dan menyerahkan perlindungan seseorang dari negara. Yang menjadi hak-hak dan kewajiban merupakan hal yang bermacam dari suatu negara dengan negara lainnya.

³ Hidajat Imam, 2019, *Teori-Teori Politik*, Malang: Setara press, h.2.

c. Pengertian Islam

Secara *etimologi* kata Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosa kata *salima* yang berarti Selamat Sentosa. Kemudian dibentuk menjadi *aslama* yang berarti taat dan berserah diri. Sehingga terbentuk kata Islam (*aslama-yuslimu-islaman*) yang berarti damai, aman, dan selamat. Orang yang masuk Islam dinamakan Muslim⁴.

d. Pengertian Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis juga dikatakan sebagai cara seseorang untuk mengamati sebuah penelitian terdahulu guna memperoleh hasil untuk diteliti.

e. Pengertian Kaderisasi

Defenisi kaderisasi secara terminologis adalah proses percetakan kader. Perkaderan adalah suatu proses terciptanya kemandirian kader bagi kaderisasi organisasi.

D. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui motivasi penyusunan Materi Perkaderan IPPNU di Kota Medan
2. Untuk mengetahui bagaimana corak Politik Islam Kebangsaan dalam materi perkaderan IPPNU di Kota Medan.

⁴ Abudin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta, h. 231.

E. Kegunaan penelitian.

1. Secara akademis, yaitu agar dapat dijadikan sebagai salah satu syarat untuk mengetahui tugas metode penelitian ilmiah.
2. Manfaat untuk peneliti sendiri dapat memberikan manfaat dan wawasan mendalam mengenai analisis materi perkaderan IPPNU di Kota Medan.

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah cara peneliti untuk mencari perbedaan dan selanjutnya untuk menemukan ide baru untuk penelitian selanjutnya. Pada posisi ini peneliti menempatkan bermacam hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian yang ingin dilaksanakan.

adapun keterkaitannya dengan pembahasan mengenai Politik Islam Kebangsaan analisis materi perkaderan IPPNU.

Beberapa buku yang diterbitkan oleh PP IPPNU seperti buku pedoman perkaderan, hasil keputusan kongres, dan buku petunjuk pelaksanaan organisasi dan administrasi. Dalam buku pedoman perkaderan IPPNU dipaparkan beberapa materi-materi yang wajib untuk disampaikan ketika kaderisasi. Materi tersebut berguna untuk kader-kader pemula, agar memahami landasan organisasi. IPPNU sebagai gerakan sosial anak muda pelajar Islam yang memiliki semangat cinta bangsa,. Ke-Islaman dan kebangsaan dipegang erat. Komitmen ini yang disebut Politik Islam Kebangsaan.

G. Metode penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dipandang dari bentuknya, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research), disebut sebagai penelitian pustaka karena data atau bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, jurnal, dokumen maupun web atau internet. Dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada analisis terhadap materi perkaderan IPPNU di Kota Medan maka dari itu penelitian ini merupakan penelitian yang memakai cara analisis deskriptif digunakan untuk meneliti, teknik pengambilan data menggunakan teknik triangulasi dan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian yang sudah dahulu. Untuk memudahkan peneliti terlebih dahulu dituntut untuk mengenal dan memahami, hal ini sangat penting agar lebih gampang mendapatkan dan mengakses sumber yang di butuhkan.

b. Sumber Data.

Yang dipakai penulis dalam penelitian ini ada dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya⁵. Data primer meliputi beberapa data yang dibutuhkan penulis dalam penelitiannya.

⁵ M.Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), h. 81

Berikut beberapa buku yang penulis gunakan sebagai referensi yaitu buku AD/ART IPPNU, Pedoman Organisasi dan Buku Buku NU guna mencari data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sebuah data yang sudah diviralkan untuk khalayak umum oleh instansi yang mengumpulkannya, mengolah dan menyajikan.

c. Metode Pengumpulan Data

Pada metode tersebut peneliti akan melakukan penelitian terhadap wacana dari buku-buku, artikel, jurnal, web atau internet dan informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Pengumpulan data dilaksanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

Adapun jenis data yang dikumpulkan selama proses penelitian yang di peroleh dengan metode telaah pustaka. Pengumpulan data dapat dilaksanakan dalam beberapa cara dan beberapa tempat. Dipandang dari pengaturan data dapat disatukan pada pengaturan alamiah. Dipandang dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

d. Teknik Analisis Data

Sesudah data lengkap dan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, sehingga langkah selanjutnya adalah mengumpulkan dan mengelola data yang sudah disatukan dengan cara memberi penjelasan semua data untuk dianalisa.

Data yang didapatkan di lapangan dan di analisa dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Cara analisis deskriptif yakni usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun data, lalu dilakukan analisis kepada data tersebut. Analisis deskriptif yaitu data yang sudah dikumpulkan adalah suatu kata-kata, angka, dan buku.

1. Reduksi Data

Secara teorinya reduksi data digunakan agar memudahkan data penelitian gampang diakses serta lebih mudah dimengerti dan dijabarkan dalam hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data ialah sebagian informasi yang mempersembahkan suatu kemungkinan adanya penarikan kesimpulan terhadap penemuan penelitian. Penyajian data dilaksanakan dalam bentuk uraian deskripsi.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data penelitian dipersembahkan dalam bentuk deskripsi, langkah berikutnya melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan pada tahap-tahap awal bersifat lapang tetapi terbuka untuk di komentari. Selanjutnya akan berkembang menjadi kesimpulan akhir yang bersifat terakhir setelah melalui proses pemeriksaan secara lanjut.

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Guna memastikan keabsahan data dilandaskan atas beberapa penetapan tertentu. Batas kepercayaan pada awalnya menggantikan konsep ukuran seperti pada penelitian kualitatif. Gunanya untuk melakukan inkuiri sehingga tingkat

kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti. Kedua, keteralihan. Ketiga, kebergantungan; merupakan substitusi istilah reabilitas dalam penelitian kuantitatif, yaitu pengulangan dalam kondisi yang sama.

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini juga melalui teknik triangulasi, yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang lain diluar data yang telah diperoleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data yang telah diperoleh⁶.

H. Sistematika Penulisan.

Secara keseluruhan laporan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab. Pembagian bab hanya bertujuan untuk pembahasan focus isi mengikuti struktur umum dalam penelitian ilmiah. Antara bab yang satu dengan bab yang lain pada umumnya adalah merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Adapun struktur dari isi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Istilah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II menyajikan gambaran Politik Islam Kebangsaan menurut tokoh-tokoh.

Bab III berbicara tentang profil, sejarah, perkembangan IPPNU.

⁶ Fajrie, Mahfudlah, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi dan Tradisi Pesisiran*, (Penerbit Mangku Bumi, 2016).h.50

Bab IV menyajikan Politik Islam Kebangsaan: Analisis terhadap Materi Perkaderan IPPNU di Kota Medan.

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

POLITIK ISLAM KEBANGSAAN

A. Wawasan Kebangsaan.

1. Pengertian.

Jika diperdengarkan dengan kata Bangsa biasanya kebanyakan orang pasti menyamakannya dengan Negara. Padahal, dua kata tersebut merupakan dua istilah yang jauh berbeda. Bangsa dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang mempunyai identitas, budaya, serta ideologi yang sama, kalau Negara bisa diartikan sebagai tempat organisasi yang dipakai untuk memuat dan melayani bangsa. Dalam arti politisnya Bangsa ialah masyarakat dalam suatu lingkungan tertentu yang taat kepada kedaulatan negara sebagai suatu kekuasaan tertinggi. Rasa kebangsaan bisa muncul dan ada secara berbeda dari setiap manusia dan memiliki naluri kejuangannya masing-masing. Rasa kebangsaan ialah sadar akan berbangsa. Bangsa yang dimaksudnya ialah sekelompok orang yang mempunyai identitas

Pengertian bangsa menurut Para Ahli:

a. Hans Kohn.

Menurut Hans Kohn, bangsa terjadi sebagai dampak adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya.

b. Ben Anderson.

Menurut Ben Anderson, bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang sudah jelas batas-batasnya dan sudah diakui atau pun berdaulat.

Secara nyata rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit untuk di implementasikan. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari setiap manusia dan memiliki naluri kejuangannya masing-masing. Rasa kebangsaan ialah kesadaran akan cinta tanah air karena kebersamaan sosial yang muncul dari kebudayaan. berbangsa yaitu rasa yang lahir secara alami karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Sebenarnya wawasan kebangsaan tidak lahir dengan sendirinya melainkan hasil konstruksi dari realitas sosial dan politik. Sikap cinta kepada tanah air harus dimulai dari rumah, seringnya berkumpul dan berdiskusi dengan keluarga perlahan akan terinternalisasi dalam diri. Sebenarnya setiap orang harus memiliki rasa cinta kepada tanah air, memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi.

Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, daripada mengutamakan kekuasaan dari beberapa golongan. Berbicara soal politik kebangsaan secara mendasar bahwa platform ini mengutamakan visi politik yang mempunyai proposisi pada keindonesia an, kemanusiaan dan keadilan bagi setiap golongan serta menjadi penting posisinya untuk dihidupkan dan diimplementasikan kembali

Wawasan kebangsaan pada dasarnya ialah keinginan yang sangat kuat untuk kebersamaan dalam mengatasi segala perbedaan dan diskriminasi. Wawasan berasal dari pangkal kata “wawas dan akhiran “an”. “wawas” yang memiliki arti pandangan. Sedangkan “wawasan” berarti cara memandang, meninjau, dan melihat. Jadi wawasan kebangsaan pada dasarnya ialah keinginan yang kuat untuk kebersamaan dalam mengatasi perbedaan dan diskriminasi. Tujuan wawasan kebangsaan ialah membangun kembali semangat kebangsaan dan mendorong terwujudnya hidup yang harmonis, menjaga keutuhan bangsa serta mendorong cita-cita tujuan nasional..

Pada perkembangan perekat ini dikenal sebagai idologi yang diinginkannya dipahami oleh bangsa itu sendiri. Jadi, bangsa ialah suatu kesatuan solidaritas yang terbentuk persamaan bahasa, ras, agama, peradaban, wilayah, negara dan kewarganegaraan yang saling merekatkan satu dengan yang lain. Jadi, pengertian kebangsaan ialah segala sesuatu yang terkait dengan identitas suatu bangsa mulai dari semangat mengubah bangsa dan cinta akan tanah air hingga ideologi yang hidup dalam suatu negara.

Setiap orang pasti memiliki rasa kebangsaan dalam perasaan atau pikiran dan di dalam hati nuraninya. Secara nyata rasa kebangsaan itu seperti sesuatu yang dapat dirasakan tetapi sulit untuk di implementasikan. Rasa kebangsaan bisa timbul dan terpendam secara berbeda dari setiap manusia dan memiliki naluri kejuangannya masing-masing. Rasa kebangsaan ialah kesadaran berbangsa yaitu rasa yang lahir secara alami karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Dinamisasi rasa

kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana suatu bangsa mempunyai cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan dan semangat patriotisme.

2. Makna Wawasan Kebangsaan.

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai berikut:

- a. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan.
- b. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;
Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia;
- c. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju.

3. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan.

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu: penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;

- a. tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan besatu.
- b. cinta akan tanah air dan bangsa.
- c. demokrasi atau kedaulatan rakyat.
- d. kesetiakawanan sosial.
- e. masyarakat adil-makmur.

B. Pengkaderan (Kaderisasi)

1. Pengertian Pengkaderan (Kaderisasi)

Kaderisasi berasal dari kata Kader. Istilah kader memiliki beberapa pengertian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kader merupakan orang yang diharapkan memegang peranan atau pekerjaan penting di dalam sebuah pemerintahan, partai, organisasi dan lainnya. Dalam kamus umum kaderisasi diartikan proses, cara, membentuk seorang kader.⁷

Tolak ukur sebuah kaderisasi ialah cara penyiapan sumber daya manusia agar kedepannya dapat menjadi pemimpin yang bisa jadi peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. Dalam pengkaderan itu sendiri terdapat dua

⁷ Zainal Bahri, Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik, (Bandung : Angkasa, 1996).

persoalan penting *pertama*, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. *Kedua*, ialah kemampuan untuk menyediakan stok kader yang dikhususkan bagi kaum muda.⁸

Kaderisasi ialah suatu bentuk perkaderan atau pengenalan semua organisasi. Kaderisasi ialah sebuah pembentukan kader yang mutlak untuk membangun struktur kerja yang ,mandiri dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya kaderisasi karena perlu adanya memberikan pengetahuan, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, visi, misi dan strategi.

Kaderisasi membutuhkan ideologi yang jelas dan tegas. Ideologi itulah yang menjadi pembeda dibandingkan komunitas atau kelompok lain. Di dalam ideologi ada orientasi, motivasi dan juga semangat yang membuat orang bersedia mengorbankan apa saja, termasuk harta dan juga jiwa, demi mewujudkannya. Namun, jika ideologi itu buatan manusia belaka, maka akan terdapat banyak sekali celah-celah kelemahan. Sebab, dalam perspektif manusia dengan cerapan panca indera yang terbatas, pun dengan akal yang memberikan pandangan yang berbeda-beda. Karena itulah, dibutuhkan ilmu pengetahuan dari Yang Mahara Tahu. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan itu melalui para rasul-Nya.

Tujuan kaderisasi ialah mempersiapkan calon-calon embrio yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader dalam suatu organisasi ialah yang sudah memiliki kemampuan dan siap dengan berbagai disiplin dan keterampilan ilmu untuk bersaing dikanca globalisasi. Pandangan

⁸ Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), h. 114.

umum mengenai kaderisasi suatu organisasi bisa di petakan menjadi dua ikon secara umum. *Pertama*, subjek atau pelaku kaderisasi sebuah organisasi ialah individu atau sekelompok orang yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan kebijakan-kebijakannya yang melaksanakan fungsi regenerasi dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. dan *kedua*, sasaran kaderisasi (objek) dengan arti lain ialah individu-individu yang dipersiapkan dan dilatih untuk meneruskan visi dan misi organisasi.

Potensi dasar seorang kader begitu sangat di pertimbangkan. Potensi dasar yang dimaksud ialah sudah dapat dibaca melalui perjalanan hidupnya. Sejauh mana kecenderungan terhadap masalah-masalah sosial lingkungannya. Kaderisasi merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi, kaderisasi merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Kaderisasi ialah sebuah pembentukan kader yang mutlak untuk membangun struktur kerja yang ,mandiri dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya kaderisasi karena perlu adanya transfer pengetahuan, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, visi, misi dan strategi.

2. Pengkaderan (kaderisasi) perspektif Islam.

Kaderisasi membutuhkan ideologi yang jelas dan tegas. Ideologi itulah yang menjadi pembeda dibandingkan komunitas atau kelompok lain. Di dalam ideologi ada orientasi, motivasi dan juga semangat yang membuat orang bersedia mengorbankan apa saja, termasuk harta dan juga jiwa, demi mewujudkannya. Namun, jika ideologi itu buatan manusia belaka, maka akan terdapat banyak sekali celah-celah kelemahan. Sebab, dalam perspektif manusia dengan cerapan panca indera yang terbatas, pun dengan akal yang memberikan pandangan yang

berbeda-beda. Karena itulah, dibutuhkan ilmu pengetahuan dari Yang Mahara Tahu. Allah telah memberikan ilmu pengetahuan itu melalui para rasul-Nya. Dan petunjuknya yang ada dalam Islam dengan sumber Al-qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dalam beberapa redaksi dan gaya yang sangat tegas memberikan tekanan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus dijalankan dengan sepenuh ketundukan.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (An-Nisa : 09).

Maksud menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai basis kaderisasi ialah segala ajaran keduanya dijadikan sebagai kerangka berfikir, berperilaku, sampai menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Secara otomatis juga menjadikan keduanya sebagai penangkal bagi paradigma-paradigma lain yang sesat dan menyesatkan. Karena itu, para kader dilatih untuk memiliki sikap kritis untuk tidak memberikan celah sempit sekalipun bagi paradigma yang secara spintas menarik padahal sesungguhnya menyesatkan. Kader yang diharapkan dalam konteks ini haruslah memiliki kapasitas lengkap, tidak hanya muslim, tetapi harus muslim intelektual profesional.

Dalam suatu organisasi kaderisasi sangat dibutuhkan organisasi dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Seperti sebuah hukum alam, ada proses perputaran dan pergantian disana. Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat dilihat dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal.

Dalam Ayat yang lain disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh (As-Shaff :04).

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa untuk menghasilkan kader-kader yang berpotensi yakni dengan perencanaan yang matang dan sistem yang teratur. Sekilas dipandang tentang luar biasanya sistem kaderisasi yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah dalam mengkader tidaklah sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Sehingga kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau serukan.

C. Pendapat Tokoh terkait Politik Islam Kebangsaan.

Politik Islam kebangsaan merupakan sikap patriotisme dan nasionalisme yang seharusnya menjadi rujukan warga Nahdliyin untuk kembali pada gerakan politik nilai yang lebih mengedepankan kepada politik kebangsaan, yakni tidak perlu terjebak pada politik praktis yang oportunistik dan berorientasi pada kekuasaan semata. Politik Islam kebangsaan yang dimaksud ialah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan pada tingkat makro politik berkewajiban menjaga keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Ahlussunnah wal Jama'ah yang dikembangkan oleh NU mempunyai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi tingkah laku sosial dan pemahaman keagamaan di kalangan NU⁹.

Berikut ialah paparan pendapat dari beberapa tokoh NU

1. Menurut Abdurrahman Wahid.

Dr.(H.C) K.H Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gur Dur lahir di Denanyar dekat kota Jombang, Jawa Timur, pada 07 September 1940, jika menurut penanggalan Islam yakni pada bulan Sya'ban tepatnya 04 Sya'ban¹⁰. Beliau anak pertama dari enam bersaudarah. Gur Dur dilahirkan dalam latar belakang keluarga muslim Jawa terkemuka, karena kedua kakenya merupakan tokoh agama terkenal yang dianggap sebagai pemimpin para ulama, dan juga aktif dalam pergerakan nasionalis Indonesia.

Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Dur adalah salah satu tokoh penting di Indonesia. Ketokohan Gus Dur dapat dilihat dari beberapa sisi. Dari sisi perannya di tengah masyarakat terutama masyarakat Islam, Gus Dur adalah ketua sebuah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdhatul Ulama selama beberapa periode, bahkan sampai menjelang akhir hidupnya. Dari sisi perannya sebagai salah seorang pemimpin bangsa, Gus Dur adalah presiden ke-empat, meskipun masa jabatannya hanya sebentar dan terhenti karena sebuah *impeachment* DPR/ MPR, namun itu tidak menyebabkan kebesaran namanya menjadi hilang. Gus Dur tetaplah tokoh yang diperhitungkan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional, meskipun seringkali

⁹ Abdul, Muchith Muzadi, Mengenal Nahdlatul Ulama, 27

¹⁰ Greg, Barton, Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid, (Yogyakarta : LKIS, 2002) h. 25

tindakan dan ungkapannya sangat kontroversial. Bukan Gus Dur namanya jika tidak kontroversi (pen.), dan itu justru yang membuat nama Gus Dur tetap saja dibicarakan.

Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-empat pada tanggal 20 Oktober 1999. merupakan presiden ke empat, beliau juga mantan ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Gus Dur alias KH. Abdurrahman Wahid, hanyalah salah satu dari banyak orang NU (Nahdlatul Ulama) yang mempunyai kapabilitas personal mumpuni dalam banyak bidang, cukup mewakili pandangan dunia (world-view) dari kultur NU.¹¹ Gus Dur bisa dikatakan sebagai sosok multidimensi yang melampaui sekaligus mengayomi beraneka ragam identitas dan pemikiran.

KH Abdurrahman Wahid bisa disebut sebagai tokoh yang paling lama bertahan di jajaran elit Indonesia paling berpengaruh. Gus Dur sampai saat ini masih tetap memainkan peranan penting dalam politik Indonesia. Gus Dur mulai masuk dalam percaturan politik dan kebangsaan Indonesia sejak awal 1970-an ketika ia baru pulang belajar dari Baghdad. Pada awalnya Gus Dur tampil sebagai sosok budayawan dan cendekiawan rakyat yang pemikiran dan sikapnya menunjukkan kepedulian terhadap nasib rakyat di tengah dinamika pembangunan nasional.

¹¹ KH. Zainal Arifin Thoha, *Jagadnya Gus Dur Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*. (Yogyakarta, kutub 2003) h. 15

Sebagai cucu pendiri NU, Gus Dur juga akhirnya berkecimpung di NU, organisasi yang telah didirikan sekaligus dibesarkan oleh kakek dan ayahnya. Pada tahun 1980, ia ditunjuk menjadi salah seorang Katib Awwal PBNU sampai tahun 1984, dan pada tahun 1984 kedudukannya telah naik menjadi ketua Dewan Tanfidz NU.¹²

Bergabung dengan NU, Gus Dur mendapat pengalaman politik pertamanya ketika ikut berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yaitu partai Islam yang merupakan fusi dari empat partai Islam termasuk NU dalam Pemilu Legislatif tahun 1982. Ketika menjabat sebagai ketua Dewan Tanfidz NU inilah karir politiknya semakin naik dan Gus Dur benar-benar menjadi salah seorang yang sangat dikenal bahkan pengaruhnya pun tidak sedikit di negeri ini, apalagi Gus Dur sering sekali melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU mulai membawa Gus Dur ke atas panggung nasional. Posisi Ketua Umum PBNU di tangannya menjadi sesuatu yang amat strategis.¹³

Gus Dur merupakan sosok intelektual organik yang bisa berperan penting sebagai pengubah sejarah dinamika politik di Indonesia. Pemikiran Gus Dur ikut memberikan konsekuensi bagi perubahan haluan politik nasional, baik pada zaman Orde Baru maupun era reformasi. Gus Dur merupakan tokoh politik yang berfungsi ganda dalam corak lain, baik dimensi keagamaan maupun dimensi

¹² Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum Tanfidzyah pertama kali pada Mukhtamar Situbundo pada tahun 1984. Lihat Irawan Suhandi (Ed), *Gus Dur Santri Par Excellence*, (Jakarta : Kompas, 2000), h. 171

¹³ A. Effendy Choiri, dkk (ed.), *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur* (Jakarta; Pensil-324, 2010), h. 131.

kebudayaan sehingga mempunyai khas yang bisa membedakan Gus Dur dengan tokoh lain.

Gus Dur adalah tipe orang yang aktif dan sangat humoris meskipun ia kuliah sambil bekerja, bahkan juga menulis untuk majalah, Gus Dur juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia. Dengan jabatannya itu, Gus Dur terus berkorespondensi dengan para mahasiswa Indonesia di seluruh Timur Tengah, dan kadang-kadang mengunjungi mereka. Gus Dur dan juga para pelajar Indonesia yang berada di Timur Tengah tersebut juga terus memantau perkembangan di tanah air yang saat itu dipimpin oleh Soeharto.¹⁴

Bagi umat NU, Gus Dur adalah figure yang mempunyai watak mengayomi, membimbing, serta memperteguh kasih sayang atas sesama.¹⁵ Tidak dapat dipungkiri bahwa pengaruh Gus Dur terhadap Nahdlatul Ulama, terutama kalangan muda begitu besar, begitu juga pengaruh NU terhadap Gus Dur. Untuk Mendekati hubungan antara Islam dan Bangsa, Gus dur berkarakter Fungsional. Maksudnya ialah, *pertama*, Gus Dur mendekati Islam berdasarkan fungsi agama ini sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi alam. Islam ialah agama hukum yang mempunyai kekuatan politik. *Kedua*, kegunaan negara sebagai alat untuk tujuan Islam.

Pada saat kegunaan dan tujuan Islam ialah kesejahteraan rakyat, berarti negara menjadi alat untuk mendapatkan tujuan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini geger berpolitikan negeri kembali menguji kebhinekaan, yaitu timbulnya sentimen rasial hingga agama seolah oleh menjadi tren. Polarisasi

¹⁴ Greg Barton, *Biografi Gus Dur...*, h.92

¹⁵ KH. Zainal Arifin Thoaha, *Jagadnya Gus Dur Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*. (Yogyakarta, kutub 2003) h. 28

politik kembali menjadi dalang atas gemuruh yang dirasakan saat ini. Yaitu munculnya beberapa ujaran kebencian akan ras tertentu, hingga dikaitkannya dengan agama-agama tertentu, seakan-akan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan berbangsa kita. Akibat dari fanatisme banyak yang saling bermusuhan, dimana penyebaran berita palsu hingga fitnah antar sesama. Yang lebih parahnya lagi adalah, terciptanya gesekan antar sesama masyarakat. Jika di korelasikan dengan konteks berbangsa dan benegara, politik dapat diartikan sebagai alat usaha bersama untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran kolektif. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bahwa politik ialah memanusiakan manusia, bukan saling bunuh dan menghancurkan yang dapat mengakibatkan perpecahan antar masyarakat.

Menegaskan kembali politik kebangsaan yaitu instrumen yang difokuskan Gus Dus untuk melihat keberlangsungan politik di Indonesia ialah demokrasi. Menurutnya, demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan hak setiap warga negara, tanpa harus membedakan latar belakang, ras, suku, agama dan golongan. Menurutnya Indonesia mengalami keadaan dimana ada perubahan pandangan dalam melihat demokrasi. Pada zaman Soeharto demokrasi hanya dipandang sebagai lembaga, yaitu ketika suara masyarakat tidak dipandang sebagai suatu perbedaan yang benar. Tetapi hanya untuk diwakilkan oleh lembaga-lembaga yang dianggap sebagai wakil masyarakat. Keadaan yang dimaksud cukup mempengaruhi cara pandang masyarakat, yaitu dalam mengartikan demokrasi itu sendiri.

Pada akhirnya banyak masyarakat yang tidak menyalurkan suaranya, padahal mereka mempunyai hak untuk memberikan suara dalam berpartisipasi politik. Keadaan ini akhirnya berpengaruh pada hilangnya arah demokrasi Indonesia. Kini politik hanya diartikan sebagai simbolik aja. Salah satu penyebab utama dari keadaan ini ialah hilangnya marwah politik kebangsaan, yang mulai pudar.

Kalau begitu penting kiranya mengembalikan gagasan Gus Dur, terutama dalam aspek politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin, serta pandangan kebhinekaan yang utuh. Perlu diketahui bahwa demokrasi tidak memandang perbedaan agama atau ras, namun melihat manusia sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Politik kebangsaan ialah gagasan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, dari pada mengutamakan kekuasaan dari golongan.

Hubungan antara Islam dan Bangsa, Gus Dur bersifat fungsional. Yang artinya, pertama, ia mendekati Islam berdasarkan fungsi agama sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi semesta (rahmatan lil 'alamin). Kedua, fungsi negara sebagai alat bagi tujuan Islam. Saat fungsi dan tujuan Islam ialah kesejahteraan rakyat, maka negara menjadi alat untuk mencapai tujuannya. Kalau begitu Gus Dur memakai kaidah al-ghayah wa al-wasail (tujuan dan cara pencapaian).

Gempar perpolitikan negeri kembali menjajal kebhinekaan kita, timbulnya sentimen rasial hingga agama seolah-olah menjadi tren. Polarisasi politik menjadi dalang atas gemuruh saat ini. Munculnya ujaran kebencian akan ras tertentu, hingga menghubungkan dengan agama-agama tertentu. Akhirnya dampak dari fanatisme tersebut banyak terjadinya permusuhan, menyebarkan

berita palsu hingga fitnah antar sesama, sehingga kehidupan politik hanya sebatas melihat terkait, siapa yang paling cocok berkuasa dan golongan mana yang paling unggul diantara kesemuanya. Jika dihubungkan dengan konteks berbangsa dan bernegara ialah politik dapat diartikan sebagai alat usaha bersama untuk mencapai keadilan dan kemakmuran.

Alat yang difokuskan Gus Dur dalam melihat keberlangsungan politik di Indonesia ialah demokrasi. Menurut Gus Dur demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan hak setiap warga negara tanpa harus membedakan latar belakang, suku, ras dan agama. Salah satu yang menjadi pemicu utama dari situasi tersebut ialah hilangnya marwah politik kebangsaan, yang mulai luntur perlahan digantikan dengan politik pragmatis dengan orientasi kekuasaan, serta kepentingan segelintir golongan yang hanya mementingkan golongan saja. Dalam gagasan Gus Dur terutama dalam aspek politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin, serta pandangan kebhinekaan yang utuh.

Politik kebangsaan merupakan pandangan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, daripada mengutamakan kekuasaan dari beberapa golongan. Berbicara soal politik kebangsaan secara mendasar bahwa platform ini mengutamakan visi politik yang mempunyai proposisi pada keindonesiaan, kemanusiaan dan keadilan bagi setiap golongan serta menjadi penting posisinya untuk dihidupkan dan diimplementasikan kembali.

Aktivisme Islam juga sering dipandang dari bentuk-bentuk yang bermacam-macam dan tumpang tindih. Aktivisme Islam dapat dilaksanakan dengan mengembangkan tipologi dua dimensi yang menjelaskan sifat wacana aktivisme Islam dan pandangan dari perlakuan programatikanya.¹⁶

Aktivisme Islam merupakan sebuah konsep yang lebih lebar dari anggapan pada umumnya. Saat menyematkan kata “Islam” dalam “Aktivisme”, dapat terlihat kekhususan Islam sebagai sistem makna, identitas dan dasar tindakan kolektif¹⁷. Banyak studi terkait dengan aktivisme Islam yang menekankan keluhan mendasar yang menimbulkan dorongan untuk tindakan kolektif, termasuk mobilitas sosial yang terhambat, kurangnya kebebasan politik, keputusan ekonomi, kerentanan budaya dan pelecehan.

2. Menurut KH. Hasyim Mujadi.

KH. Hasyim Mujadi lahir di Tuban, Jawa Timur 8 Agustus 194. Beliau ialah seorang tokoh Islam Indonesia. Kh Hasyim Mujadi ialah sosok ulama yang paling tidak meresrepresentasi dua bentuk sekaligus, pertama, ulama dengan pandangan Islam Moderat dan toleran yang mengusung spirit Islam rahmatan lil alamin. Kedua, ulama dengan komitmen kebangsaan yang kuat, sehingga banyak terlibat dalam mengawal isu-isu kebangsaan. Beliau dikenal sebagai seorang muslim yang Moderat dan toleran tanpa meninggalkan prinsip agama yang beliau yakini sejak kecil. Baginya sikap moderat dan toleran tidak boleh mengorbankan aqidah .

¹⁶ Faisal, Riza, *Aktivisme Islam Kaum Urban Politisasi identitas, Mobilisasi dan Pragmatisme Politik*, (Medan, CV Pusdikra MJ, 2020), h, 22

¹⁷ Quintan Wiktorowicz, ed., *Islamic Activism; A Social Movement Theory Approach* (Bloomington Indiana University Press, 2004)

Dalam mengembangkan semangat keislaman yang menjunjung perdamaian dan hubungan antar agama dan golongan yang harmonis. KH Hasyim menggunakan dua pendekatan. Pertama, membangun hubungan (Ukhuwah) yang kuat di internal ummat Islam. Kedua, menciptakan hubungan erat antar ummat agama-agama. Usaha untuk membangun hubungan yang semakin kuat inter-agama (Islam) yaitu dengan visi keislamannya yang moderat.

Beliau dikenal karena perannya atau pendidikan agama dan dakwah. Negara dan agama pasti mempunyai perdebatan yang sangat panjang. Namun bagaimanapun politik banyak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kehidupan manusia, terlebih kaum muslim. Telah terjadi banyak pro dan kontra yang diakibatkan oleh pengaruh politik yang lahir dari setiap generasi kaum muslim dalam melihat permasalahan politik.¹⁸

Ketika menjabat sebagai sekjend ICIS (Internasional Conference Of Islamic) 2004-2009 KH Hasyim Mujadi dalam politik kebangsaan yang selalu menyampaikan Membumikan Islam Rahmatan Lil Alamin. Agama selalu dianggapkan sebagai penebar kekerasan dan anti damai. Seakan akan ada stigma negatif agama penyokong perang.

¹⁸ Maftuh, Abegebriel dkk, Negera Tuhan; The Thematic Encyclopedia, (Yogyakarta : SR-Ins 2004), h,2.

3. Menurut Umroh Mahfudzoh.

Dalam sejarah Nahdlatul Ulama tokoh yang sangat inspiratif yaitu Nyai Hj. Umroh Mahfudzoh. Beliau mendirikan organisasi pelajar NU dalam menengakkan ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah an Nahdliyah dikalangan pelajar Islam di Indonesia, yaitu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) . mengulaskan tentang sosok Nyai Umroh Mahfudzoh, sebagai pionir gerakan perempuan NU. Beliau lahir di Kabupaten Gresik 4 Februari 1936 M dari pasangan KH Wahib Wahab, Menteri Agama ke-7 yaitu pada 1958-1962 dan Hj Siti Channah. Beliau ialah cucu dari KH Addul Wahab Hasbullah (pendiri NU dan rais Aam PBNU 1946-1971).

Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dikonsentrasikan untuk membimbing dan membina remaja putri NU yang masih berada duduk dibangku sekolah atau madrasah, serta santri yang berstatusnya setingkat dengan sekolah atau madrasah tersebut. Di usia emas, mereka berfungsi sebagai alat untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang khidupan berbangsa dan bernegara. Pada tahun 1955 IPPNU sempat disalah artikan dan disebut sebagai gerakan yang membias pada politik praktis, dan pada tahun 2003 organisasi IPPNU memperjelas bahwa wadah perjuangan IPPNU yaitu pelajar putri yang mengawal visi intelektual kepelatihan. IPPNU memiliki sifat keterpelajaran, kekeluargaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Setiap organisasi sangat penting bagi kita yang nanti hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat dibutuhkan pengalaman organisasi yang perlu dijalani dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) sudah menyiapkan bekal untuk hidup bermasyarakat.

IPPNU bisa menjadi organisasi yang bisa memberikan pengaruh yang tepat dan berguna untuk masa depan bangsa, khususnya kepada pelajar atau santri di Indonesia. Di era zaman sekarang pelajar puteri atau santri sudah saatnya menjawab tantangan zaman, mengawal pelajar Indonesia. Generasi muda NU khususnya Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) harus menjadi garda terdepan untuk membela bangsa dan negara. Generasi muda NU mencintai negara sebagian dari iman atau *Hubbul Wathan Minal Iman*.

IPPNU bisa disebut sebagai gerakan sosial anak muda pelajar puteri atau santri muslim yang memiliki semangat cinta bangsa. Keislaman dan kebangsaan sangat dipengang erat dan dijunjung tinggi. Komitmen tersebut yang dapat disebut Politik Islam Kebangsaan. Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di dirikan atas dasar keinginan atau kemauan sebagai tempat aktivitas sosial yang bertandakan amal keagamaan sebagai pencegahan munculnya keadaan sosial yang terjadi.

IPPNU sebagai tempat pengkaderan puteri atau santri NU agar searah pada posisi yang diinginkan, sehingga nilai nilai NU yang berazaskan aswaja bisa tetap terjaga kermurniannya. Ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah adalah faham paham yang mayoritas pengamutnya oleh masyarakat muslim di Indonesia. Aswaja yang di kalangan NU, didudukkan sebagai manhaj al-fikr memiliki platform politik.

IPPNU memiliki kewajiban untuk memelihara kredibilitas organisasi. Ditengah persaingan global melalui penjagaan kualitas kader. Untuk itu IPPNU perlu membangun dan melaksanakan perkaderan yang berikatan dengan kemampuan dan pemberdayaan prempuan.

BAB III

PROFIL, SEJARAH, PERKEMBANGAN IPPNU, SERTA MATERI

PERKADERAN IPPNU

A. Profil IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama)

1. Latar belakang berdirinya IPPNU.

Berawal dari perbincangan yang dilakukan oleh beberapa remaja putri yang sedang menuntut ilmu di Sekolah Guru Agama (SGA) Surakarta, mengenai keputusan Muktamar NU ke 20 di Surakarta “IPNU ialah satu-satunya organisasi Pelajar Putra Nu dan untuk perempuan harus ada organisasi yang terpisah”. Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat dengan IPPNU (*tercantum pada Peraturan Dasar IPPNU BAB I Pasal 1*). Embrio organisasi Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama muncul di Surakarta pada tahun 1955 M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 Maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 H di Malang. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim menjadi Ikatan Putri-putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas (*tercantum pada Peraturan Dasar IPPNU BAB I Pasal 2*). Panggilan atau sebutan resmi bagi anggota IPPNU ialah Rekanita, panggilan atau sebutan ini berlaku pada percakapan sehari-hari, surat menyurat, dalam sidang dan lainnya.¹⁹

¹⁹ PP, IPPNU, *Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi IPPNU*, (Jakarta: PP IPPNU, 2017), h.9

IPPNU lahir dipokuskan atas keinginan sebagai tempat aktifitas sosial dan rencana remaja yang mencirikan amaliah keagamaan serta pengakaderan remaja-remaja NU agar berjalan pada arah yang sesuai dengan nilai-nilai NU yang ber azaskan ahlussunnah wal jama'ah. IPPNU merupakan perangkat dan badan otonomnya Nahdlatul Ulama, secara kelembagaan mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama dengan badan-badan otonom yang lainnya, yakni mempunyai tugas utama melakukan kebijakan NU, terkhususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu.

2. Aqidah, Asas dan Kedaulatan IPPNU.

Peraturan Dasar Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama

BAB I NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulamadisingkat IPPNU.

Pasal 2

Waktu

Embrio organisasi IPPNU muncul di Surakarta pada tahun 1955M yang selanjutnya disahkan pada tanggal 2 maret 1955 bertepatan dengan 8 Rajab 1374 Hdi Malang. Dinamika organisasi menjadikan IPPNU mengalami perubahan akronim menjadi Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) dan kembali

menjadi Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Rabiul Akhir 1424 H untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Kedudukan

Organisasi ini berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

BAB II

AQIDAH DAN ASAS

Pasal 4

Aqidah

IPPNU beraqidahkan Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jama'ah An Nahdliyah dan mengikuti dibidang akidah Imam Abu Hasan Al' Asyari dan Imam Abu Mansur Al Muturidi, Mazhab dalam bidang fiqih mengikuti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'I dan mazhab Hambali; dibidang tasawuf imam Al Ghozali dan Imam Junaid Al Baghdadi.

Pasal 5

Asas

IPPNU berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

BAB III

KEDAULATAN

Pasal 6

Kedaulatan

Kedaulatan IPPNU berada ditangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres.

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 7

Sifat

IPPNU ialah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8

Fungsi

IPPNU berguna sebagai:

1. Tempat berkumpul dalam Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita perjuangan Nahdlatul Ulama.
2. Tempat komunikasi, hubungan dan integritas Pelajar Puteri Nahdaltul Ulama untuk menggalang ukhuwah islamiyah dan mengembangkan syiar islam Ahlussunnah wal jama'ah/

3. Tempat kaderisasi dalam Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kader bangsa.

BAB V

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 9

Tujuan

Tujuan organisasi ini ialah terbentuknya pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab atas tegak dan terlaksananya syariat Islam menurut paham *Ahlussunah wal Jama'ah An Nahdliyah* dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 10

Usaha

1. Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU.
2. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa.
3. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masyarakat.²⁰

²⁰ PP IPPNU, Hasil Keputusan Kongres IPPNU ke- XVII, (Cirebon: PP IPPNU 2018. H. 15-17

3. Visi dan Misi IPPNU.

- a. Visi perjuangan IPPNU ialah terbentuknya kesempurnaan pelajar puteri indonesia yang bertaqwa, berakhlakul karimah, berilmu dan berwawasan kebangsaan.
- b. Misi perjuangan IPPNU ialah membangun kader NU yang berkualitas, berakhlakul karimah, bersikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Serta mengembangkan wacana dan kualitas sumber daya menuju terciptanya kesetaraan gender yang dinamis, kreatif dan inovatif.

4. Struktur organisasi IPPNU

- a. Pimpinan IPPNU tingkat Pusat, disingkat dengan PP. IPPNU
- b. Pimpinan Wilayah IPPNU untuk tingkat provinsi, disingkat dengan PW.IPPNU
- c. Pimpinan Cabang IPPNU untuk tingkat kabupaten/kota, disingkat dengan PC.IPPNU
- d. Pimpinan Anak Cabang IPPNU untuk tingkat Kecamatan, disingkat dengan PAC. IPPNU
- e. Pimpinan Ranting IPPNU untuk tingkat Kelurahan, disingkat dengan PR.IPPNU
- f. Pimpinan IPPNU untuk Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren, disebut dengan Pimpinan Komisariat, disingkat dengan PK.IPPNU
- g. Pimpinan KOMisariat di Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU

- h. Pimpinan IPPNU Luar Negeri, disebut Pimpinan Cabang Istimewa, disingkat dengan PCI IPPNU²¹.

5. Lambang Organisasi IPPNU

a. Bentuk dan Isi



1. Lambang Organisasi berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran sama dengan tinggi.
2. Warna dasar hijau, dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih.
3. Isi lambang :
 - Bintang sembilan, yang sebuah besar terletak diatas, empat buah menurun di sisi kanan dan empat buah lainnya menurun disisi kiri dan berwarna kuning.
 - Dua kitab
 - Dua bulu angsa bersilang warna putih

²¹ PP, IPPNU, *Hasil Keputusan Kongres IPPNU ke-XVII*, (Jakarta: PP IPPNU, 2018), h.16

- Dua kuncup bunga melati putih di kedua ujung bawah lambang.
- Tulisan IPPNU dengan lima titik di antaranya, tertulis di bawah bulu dan berwarna putih.

b. Arti Lambang Organisasi



1. Warna Hijau : Kebenaran, Kesuburan dan Dinamis.
2. Warna Putih : Kesucian, Kejernihan dan Kebersihan.
3. Warna Kuning : Hikmah yang tinggi atau kejayaan.
4. Segitiga : Iman, Islam dan Ihsan.
5. Dua buah garis tepi warna mengapit warna kuning : dua kalimat syahadat.
6. Sembilan Bintang : Keluarga Nahdlatul Ulama, yang diartikan
 - Satu bintang besar paling atas : Nabi Muhammad SAW
 - Empat bintang disebelah kanan : empat sahabat Nabi (Abu Bakar as, Umar Ibn Khatab as, Usman Ibn affan as dan Ali Ibn Abi Thalib as)
 - Empat bintang disebelah kiri : empat mazhab yang diikuti (Maliki, Hanafi, Syafi'I dan Hambali).

7. Dua kitab : Al-Qur'an dan Hadits
8. Dua bulu bersilang : aktif menulis dan membaca untuk menambahi wacana berfikir
9. Dua kuncup bunga melati : Pelajar Puri yang dengan kebersihan pikiran dan kesucian hatinya memadukan dua unsur ilmu pengetahuan umum dan agama.
10. Lima titik di antara tulisan I.P.P.N.U. :ialah Rukun Islam.

6. Mars IPPNU.

Mars ialah lagu resmi yang menjadi identitas organisasi IPPNU. Mars dinyanyikan dalam forum dan upacara-upacara resmi organisasi.

- Pencipta Mars IPPNU : Mochtar Embut (Lagu)²²
- Disempurnakan oleh : Mahbub Junaidi (sajak).

MARS IPPNU

*Sirnalah gelap terbitlah terang
Mentari timur sudah bercahya
Ayunkan langkah pukul genderang
Segala rintangan mundur semua
Tiada laut sedalam iman
Tiada gunung setinggi cita
Sujud kepala kepada tuhan*

²² Romahurmuziy, dkk, *Sejarah perjalanan IPPNU 1955-2000*, Jakarta : PP IPPNU, 2000, h. 41

Tegak kepala lawan derita
Dimalam yang sepi dipagi yang terang
Hatiku teguh bagimu ikatan
Dimalam yang hening dihati membakar
Hatiku penuh bagimu pertiwi
Mekar seribu bunga ditaman
Mekar cintaku pada ikatan
Ilmu kucari amal kuberi
*Untuk agama bangsa dan negeri*²³

7. Jenis Perkaderan IPPNU.

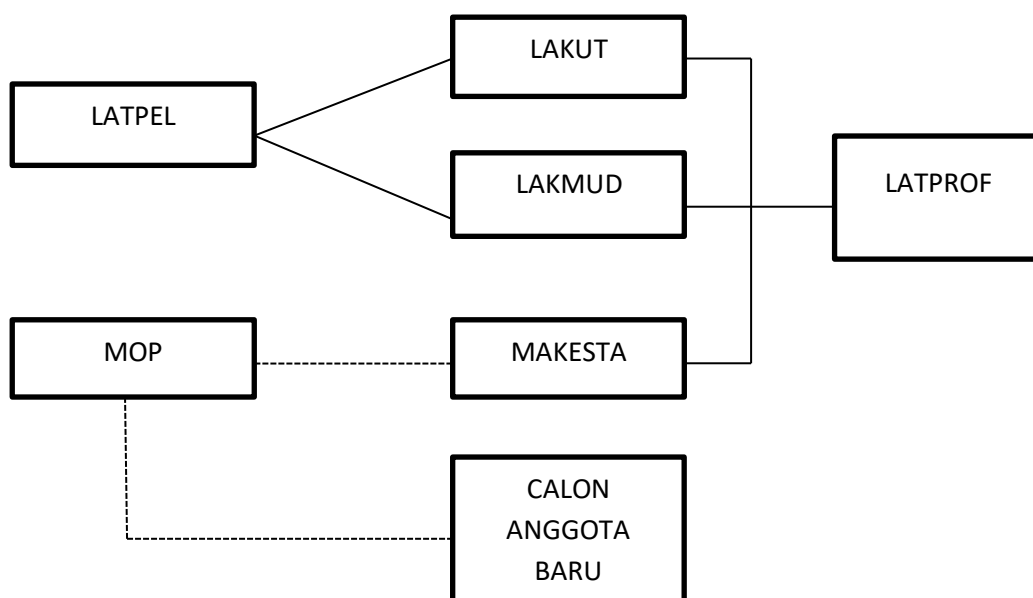
Sebagai organisasi kader bagi pelajar NU, IPPNU memiliki sistem kaderisasi yang terdiri atas beberapa jenis kaderisasi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan yang ada dalam IPPNU terdiri dari beberapa bagian yaitu pelatihan yang bersifat formal dan non formal. Hal ini dimaksudkan untuk pembagian bidang garap dari kader-kader organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan personal dan institusional. Pelatihan-pelatihan yang dimaksud adalah :

- a. **Pelatihan Formal**, terdiri dari Latihan Kader Muda (LAKMUD) dan Latihan Kader Utama (LAKUT) yang merupakan ikhtiar organisasi untuk mempersiapkan kader pimpinan yang mampu mengelola dan mengembangkan organisasi baik secara individual maupun kelompok.

²³ PP, IPPNU, *Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi IPPNU*, (Jakarta : PP IPPNU, 2017), h.9

- b. **Pelatihan Non Formal**, pelatihan ini dimaksudkan untuk menampung dari mengembangkan potensi kader yang sesuai dengan spesifikasi diri yaitu bakat dan minat, dengan menyeimbangkan kondisi perkembangan dan tuntutan zaman. Contohnya : Latihan Pelatih (LATPEL) dan Latihan Profesi.
- c. **Masa Orientasi Pelajar (MOP)**, merupakan wahana mengenalkan pelajar terhadap lingkungan sekolah (fisik maupun sosial) dan berbagai dinamikanya sehingga dapat beradaptasi dalam proses belajar.
- d. **Masa Kesetiaan Anggota (MAKESTA)**, Latihan ini identik dengan orientasi kader, sebagai upaya pengenalan awal dan pengetahuan dasar akan unsur dan perangkat umum dalam organisasi.

8. Skema Kaderisasi IPPNU.



24

B. Sejarah IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama).

Organisasi IPPNU didirikan pada tanggal 02 Maret 1955 M atau 8 Rajab 1374 H, di Kota Malang dengan kepanjangannya ialah Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama. IPPNU lahir atas keinginan untuk tempat aktifitas sosial dan program remaja yang mencirikan amaliah keagamaan serta pengkaderan remaja-remaja NU agar berjalan sesuai dengan arah yang sesungguhnya dengan nilai-nilai NU yang berazaskan Ahlussunnah wal Jama'ah. Organisasi ini dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengkaderan terhadap remaja puteri NU yang masih duduk dibangku sekolah/ atau madrasah.

Diawali dari percakapan dengan beberapa lingkup remaja putri yang pada saat itu sedang menuntut ilmu di sekolah agama Surakarta. Pada hasil keputusan Muktamar NU ke 20 di Surakarta, maka dibutuhkan adanya organisasi pelajar dikalangan Nahdliyah. Sekilas dari percakapan tersebut, berikutnya disampaikan kepada kalangan Banom NU, seperti Muslimat, Fatayat, GP Ansor, IPNU dan beberapa banom lainnya untuk membuat tim resolusi pelajar putri pada Kongres I IPNU yang dilakukan di Malang pada tanggal 28 Februari-5 Maret. Rupanya posisi pelajar putri masih diperdebatkan, karena secara administratif pelajar putri masuk kedalam departemen pelajar putra atau IPNU. Memantau dari hasil tersebut, pada hari kedua Kongres, terdapat 5 peserta putri dari perwakilan kota : Yogyakarta, Surakarta, Malang, Lumajang dan Surabaya yang terus melakukan dialog kepada banom NU yang menangani organisasi pelajar, ialah Pimpinan Besar Ma'arif dan Pimpinan Pusat Muslimat. Dari dialog tersebut dibentuklah perjanjian, bahwa :

- a. Pembentukan organisasi IPNU Putri disahkan pada tanggal 2 Maret 1955, secara administratif terpisah dari IPNU yang terlahir terlebih dahulu.
- b. Tanggal 2 Maret atau 8 Rajab 1374 H disahkan sebagai hari kelahiran IPNU Putri
- c. Untuk melakukan organisasi dan upaya pembentukan pelajar putri, maka ditetapkan ketua dan sekretaris, yaitu Umroh Mahfudhoh dan Samsyiah Mutholib
- d. Pimpinan Pusat IPNU putri berada di Surakarta Jawa Tengah.

Dengan berlakunya UU NO. 8 Tahun 1985 tentang Tata Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang melarang adanya organisasi pelajar lain selain OSIS. Setelah runtuhnya Orde Baru dan terbentunya kran kebebasan, memberikan peluang kepada IPPNU dalam basis pelajar untuk mendirikan organisasi dikalangan pelajar putri.

Dengan Kongres XIII tahun 2003 di Surabaya IPNU Putri berubah nama menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama atau disingkat dengan IPPNU. Dimana makna “pelajar” berberda dengan makna pelajar pada tahun 1955 yaitu komunitas generasi muda yang mengawal visi intelektual²⁵. Kebijakan ini sudah memasuki priode ketiga dalam kepengurusan PP. IPPNU (sejak 2003-2009), tetapi bentuk realisasi dan konsolidasi yang dilaksanakan belum maksimal. Maka dalam rakernas IPPNU tahun 2010, merekomendasikan peremajaan usia untuk anggota IPPNU ialah 27 tahun, dan garapan organisasi difokuskan pada pelajar dan santri.

²⁵ Romahurmuziy, dkk, *Sejarah Perjalanan IPPNU 1955-2000*, Jakarta : PP IPPNU, 2000, h. 10

C. Perkembangan IPPNU (Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama) di Kota Medan.

Sebagai generasi muda yang secara realitas berkewajiban untuk tetap mengambil bagian penting sebagai tulang punggung bangsa, oleh karena itu IPPNU memiliki potensi yang tinggi untuk memberikan sumbangsuhnya terhadap arah dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tahun 1985 IPPNU telah mengalami pasang surut organisasi dan banyak berbagai peristiwa nasional yang turut mewarnai organisasi ini.

Pada saat itu ketika pemerintah mulai memberlakukan UU No. 08 tahun 1985 tentang keormasan khususnya organisasi lain seperti IPPNU dan lainnya tidak diijinkan untuk memasuki lingkungan sekolah. Oleh karena itu pada tahun 1987 di Jombang IPPNU mengadakan kongres IPPNU IX secara singkat sudah menyiapkan asas organisasi dan IPPNU yang memiliki kepanjangan “Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama” berubah menjadi “Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama” . selanjutnya angin segar reformasi sudah pula memperngaruhi wacana yang ada dalam IPPNU.

Namun perjalanan organisasi kitika sudah menjadi “putri-putri” dirasa membelenggu perjalanan IPPNU yang sebenarnya menjadi organisasi pelajar di kalangan NU. Ternyata keinginan untuk kembali kebasis semula yaitu pelajar, sehingga pada kongres IPPNU XII di Makassar tahun 2000 kembali mendeklarasikan bahwa IPPNU akan dikembalikan ke basis pelajar dan penguat wacana gender.

Pada kongres IPPNU XIII selanjutnya pada tahun 2003 IPPNU tidak hanya mendeklarasikan kembali kebasis pelajar tetapi juga balik kenama semula yaitu **“Ikatan Pelajar Putri Nhadlatul Ulama”** . dengan perubahan nama ini, IPPNU harus bisa menunjukkan komitmennya untuk memberikan kontribusi pembangunan SDM generasi muda terkhusus dikalangan pelajar putri sehingga tidak terlibat dalam politik praktis yang bisa membelenggu gerak organisasi.

IPPNU merupakan wadah berkumpulnya pelajar putri. Sejak tahun 2000 IPPNU sudah ada di Kota Medan, tetapi pergerakannya masih lamban. Kemudian di tahun 2009 terjadi proses regenerasi IPPNU. Untuk tingkatan Pimpinan Cabang Kota Medan harus bisa meningkatkan konsolidasi khususnya dalam memperluas organisasi ke sejumlah PAC di Kota Medan yang belum terbentuk. Di Kota Medan untuk nama IPPNU itu sendiri sudah banyak dikenal oleh kalangan putri ataupun santri, bahkan di beberapa PAC anggotanya sendiri rata-rata setingkat dengan sekolah menengah atas. Dengan dikenalnya IPPNU ini sendiri dilingkungan pelajar putri sangat membantu perkembangan mereka. Beberapa hasil kreativitas kader IPPNU Kota Medan yang telah dicapai ialah pernah menjadi juara 3 pada tahun 2011 dalam lomba pidato antar OKP sekota Medan, dan beberapa kegiatan kader IPPNU Kota Medan yang aktif seperti IPPNU membuka stan di ramadhan fair pada tahun 2010.

Namun seiring waktu pergerakan IPPNU di Kota Medan masih Lamban. Seharusnya untuk para Pimpinan Pusat harus bisa memonitoringkan setiap IPPNU yang berada di wilayah, cabang dan lainnya. Sehingga IPPNU masih tetap eksis di era seperti ini, IPPNU sangat berpengaruh kepada organisasinya yang bisa memberikan pengaruh yang tepat dan berguna untuk masa depan bangsa

dan negara. Setiap kader IPPNU harus memiliki semangat cinta bangsa, keislaman dan kebangsaan sangat dipegang erat dan di junjung tinggi. Organisasi ini juga memberikan efek yang baik kepada anggota IPPNU tersebut.

Setelah redupnya perjalanan IPPNU dalam kurun waktu 10 Tahun kebelakang (2008-2018), bukan hanya IPPNU yang ada di Kota Medan begitu juga IPPNU yang ada di Sumatera Utara. Ditahun 2018 dilakukan Konferwillub (Konferensi Wilayah Luar Biasa) yang langsung dihadiri Ketua Umum IPPNU dan pengurus IPPNU Sumut periode sebelumnya. Ini menjadi angin segar bagi kader-kader IPPNU bahwa regenerasi kepemimpinan ditubuh organsasi disuport dari berbagai kalangan, baik dari tingkat pusat sampai senior-senior Nahdlatul Ulama Sumatera Utara.

Dikonferwillub IPPNU yang ke- XX terpilihah Heriyanti untuk menahkodai organisasi Pelajar Nahdlatul Ulama tersebut. Pada Konferwillub IPPNU yang ke-XX mengangkat tema *“Perspektif Perempuan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara”*. Dengan diangkatnya tema tersebut, ini menunjukkan bahwa komitmen kebangsaan IPPNU tegak lurus dengan mempertahankan UUD 45, Pancasila sebagai dasar negara ditengah tantangan tergerus kebhinekaan oleh paham paham ekstrim dalam menjalankan agama.

Dipertengahan 2018-2019, IPPNU Sumut giat turun ke daerah dibeberapa kab/kota di Sumut untuk menghidupkan kembali atau membuka IPPNU. Ini adalah bukti bahwa dengan menghidupkan atau membuka IPPNU di kab/kota di Sumut semakin melebarkan sayap generasi generasi pelajar yang cinta tanah air. Pengurus IPPNU inilah yang nantinya menjadi ujung tombak untuk

menyebarkan luaskan paham Islam Ahlul Sunnah Wal Jama'ah, Islam Indonesia dan mencintai agama serta bangsa. Menjelaskan bahwa agama dan negara ialah satu tarikan nafas yang sama, tidak perlu diperdebatkan, tetapi harus diperkuat dan dilindungi.

Bukan hanya itu, IPPNU juga giat dalam melakukan dialog dan seminar sebagai upaya menyebarkan komitmen kebangsaan. Dialog dan seminar yang dilaksanakan selalu mengangkat tema yang berkaitan dengan materi-materi pengkaderan IPPNU. Pada saat Rakerwil (Rapat Kerja Wilayah) IPPNU tema yang diangkat ialah "peranan Strategis Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama dalam mengawal NKRI" ini adalah salah satu implementasi dari materi perkaderan IPPNU. Narasumber yang hadir pada hari itu ialah Ketua Umum PP IPPNU 2016-2019 Puti Hasni, Komnas Perempuan RI Bahrul Fuad, dan mewakili pihak Pemprovsu Hj. Nurlel, M.AP dan peserta yang hadir pada kegiatan tersebut, dihadiri oleh berbagai organisasi pelajar dan mahasiswa, dan yang paling utama adalah para siswi/siswa Madrasah Aliyah, SMK, SMA yang ada di Kota Medan. Ini adalah salah satu contoh komitmen kebangsaan, menyebarkan Islam Rahmatan Lilalamin, Islam Moderat dan cara bernegara yang baik, tidak terlalu ke kiri dan tidak terlalu ke kanan.

Kegiatan-kegiatan kaderisasi seperti makesta, lakmud terus dilaksanakan. Ini ialah wujud penguat komitmen kebangsaan dalam internal IPPNU sendiri. IPPNU Medan sendiri juga pernah melaksanakan Makesta (Masa Kesetiaan Anggota) pada April 2019. Pesertanya dari kalangan pelajar puteri yang ada di Kota Medan. Tema yang diangkat juga tidak lepas dari bingkai Islam Indonesia, yaitu "*Memberdayakan Potensi Pelajar Puteri Menuju Industri 4.0*

dengan tetap Berpegang Teguh pada Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah” output dari kegiatan ini ialah agar pelajar Putri Nahdlatul Ulama mampu mengikuti era digitalisasi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tetap berpegang teguh pada Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, Islam yang moderat dan Islam yang mengikuti perkembangan zaman.

BAB IV

POLITIK ISLAM KEBANGSAAN

(ANALISIS MATERI PERKADERAN IPPNU DI KOTA MEDAN)

A. Motivasi Penyusunan Materi Perkaderan IPPNU.

Materi kaderisasi IPPNU terdiri atas berbagai macam materi yaitu:

	Materi Perkaderan IPPNU
Makesta	Materi wajib: <ul style="list-style-type: none">- aswaja- ke –NU-an- Ke-IPPNU-an
Lakmud	Wajib: <ul style="list-style-type: none">- Aswaja dan ke Nuan- Peta pergerakan IPPNU- Keorganisasian- Kepemimpinan- Gender/keputrian
Lakut	Wajib: <ul style="list-style-type: none">- Aswaja dan ke Nuan- Peta pergerakan IPPNU- Gerakan sosial dan Keorganisasian <ul style="list-style-type: none">- Kepemimpinan- Gender/keputrian- Analisa Kebijakan Publik
Latpel	Materi wajib: <ul style="list-style-type: none">- Perencanaan sosial- Analisis sosial- Gerakan sosial

Materi perkaderan begitu penting bagi calon kader baru, karena begitu banyak materi yang harus dipahami tentang sebuah organisasi. Begitu juga di IPPNU. Ada beberapa materi penting yang harus dipahami, seperti materi kaderisasi ke-NU-an. Sebagai dari bagian NU, IPPNU merupakan badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Materi ke-Nu-an ialah materi yang wajib untuk disampaikan ketika kaderisasi, yang didalam materi tersebut dipaparkan mulai dari kelahiran NU, struktur organisasi NU, badan otonomnya NU hingga arah perjuangan NU dan tradisi amaliyahnya orang NU. Dampak ketika kader baru tidak mengikuti kaderisasi, otomatis ia tidak akan mengerti apa itu organisasi IPPNU. Di dalam IPPNU ada beberapa materi wajib yang harus diketahui, seperti ke-NU-an, ke-IPPNU-an, dan aswaja. Karna materi tersebut materi wajib harus diketahui.

ASWAJA merupakan salah satu materi dalam kaderisasi IPPNU, Ahlussunah Wal Jama'ah menurut bahasa yaitu Ahlun berarti kelompok, keluarga, golongan. Sunnah yang artinya ajaran nabi yang terdiri atas perkataan, perbuatan, ketetapan nabi Muhammad SAW, Al Jama'ah yang artinya golongan mayoritas umumnya umat Islam. Sedangkan menurut istilah Ahlussunah Wal Jama'ah ialah ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rosulullah bersama para sahabat sabahatnya pada zaman itu. Nabi Muhammad SAW sudah memprediksi bahwa pada suatu saat umatku akan terpecah menjadi 72 golongan dan yang selamat dari kesesatan ialah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Sebagaimana hadist Nabi yang diriwalkan berikut ini :

Diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَيَّ ثِنْتَيْنِ
وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفَرَّقَتْ أُمَّتِي عَلَيَّ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً
قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kaum Bani Israil telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan”. Lalu sahabat bertanya, “Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab, “(Golongan itu adalah orang-orang yang berpegangan pada) semua perbuatan yang telah aku lakukan, serta semua perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku,” (Sunan al-Tirmidzi, 2565)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aswaja ialah golongan pengikut ajaran Islam yang selalu berpegang teguh pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah para Khulafaurroyidin, ijma’ ulama dan mengikuti mazhab empat (Hanafi, Maliki, hambali, syafi’i). aswaja memiliki beberapa prinsip yang dimilikinya yaitu *Tawasud* (*garis tengah*) dan *I’tidal* (*garis lurus*) sikap tengah yang berintikan prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. *Tasamuh*, yaitu sikap toleran terhadap suatu perbedaan baik masalah keagamaan, khususnya hal-hal yang bersifat furu’iyah atau masalah khilafiyah serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. *Tawazun*, yaitu perilaku seimbang dalam berkhitmad menyelaraskan berhikmah kepada Allah SWT. *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*, yaitu yang mempunyai sikap untuk mendorong perbuatan yang baik dan bermanfaat serta menolak setiap hal yang merugikan. Dalam konteks Indonesia transisi demokrasi di era Reformasi mendorong munculnya simbol

simbol Islam secara lebih mencolok di arena politik, menyertai berkembangnya politik identitas.²⁶

Dalam sebuah organisasi, dikenal dengan sebutan kaderisasi. Menurut KBBI, kaderisasi berawal dari kata “kader” yang mempunyai arti, orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam sebuah organisasi. Kalau begitu kaderisasi ialah suatu proses dalam membentuk kader-kader baru dalam suatu organisasi. Selain itu kaderisasi juga menciptakan kader-kader yang mendukung sesuai dengan yang diinginkan .bukan karena paksaan. Pola kaderisasi berawal dari sebuah konsep, konsep itu haruslah dibutuhkan pendidikan dan ilmu pengetahuan, aktualisasi, serta kesejahteraan baik dari jasmani maupun rohani. Harus memberikan kaderisasi yang beresensi untuk menciptakan insan yang baik. Untuk itulah, biasanya dalam organisasi memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART).

AD-ART ialah petunjuk dalam membentuk kader dalam sebuah kaderisasi, juga sebagai petunjuk dalam membangun organisasi tersebut. AD-ART sebagai simbol identitas dari organisasi yang terdapat visi serta misi dari organisasi. Bisa dikatakan AD-ART itu seperti UUD dalam pemerintahan. AD-ART mempunyai fungsi harus mengusahakan tujuan pendidikan, membangun jiwa kepemimpinan setiap kader, memupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan dan memberikan kontribusi kepada kader-kadernya dalam organisasi tersebut.

²⁶ PP, IPPNU, Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi IPPNU, (Jakarta : PP IPPNU, 2017), h. 137-140.

Terkait dalam cara strategi pencetakan kader, yakni ada 3 poin yang wajib digaris bawahi untuk mendesripsikan kaderisasi secara jelas.

1. Manusia

Kaderisasi ialah pencetakan manusia sehingga cara perhitungannya pun harus sesuai dengan nilai manusiawi. Manusia ialah kesatuan dari tiga bagian potensial, yaitu intelektual, emosional dan spiritual. Kaderisasi yang dilaksanakan terhadap manusia harus memcapai persyaratakan pengembangan ketiga aspek tersebut. Cara dalam pengembangan tiga aspek manusiawi haruslah tepat dan luas. Indoktrinasi pada materi tertentu, yakni materi ideologi masih dapat dilakukan. Namun, pada bagian materi metode indoktrinasi dapat digantikan dengan stimulus kritis agar yang mengikuti proses perkaderan dapat menemukan intelektualnya sendiri. Pengembangan emosi dapat dilakukan dengan menciptakan kondisi yang secara tidak langsung mampu mengikat mereka secara emosional baik kepada organisasi maupun dengan kader di dalamnya. Jika mutu spritual dapat ditingkatkan dengan memberikan peluang bagi mereka yang memiliki spiritnya dalam melakukan tindakan ke depan.

2. Kompetisi

Dalam sebuah organisasi, kompetisi yang dibutuhkan ialah kompetisi organisasional baik internal maupun eksternal yang dicocokkan dengan kebutuhan dan aktivitas organisasi tersebut.

3. Organisasi

Cara kaderisasi yang dilakukan mempunyai tujuan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan eksistensi sebuah organisasi. Maka dalam proses kaderisasi harus ada deskripsi mengenai organisasi.

IPPNU sudah banyak mengalami perubahan dan pembenahan pola perkaderan, pada awalnya, proses pengkaderan yang IPPNU untuk pembinaan dan mencetak kader. Di dalam buku pembinaan kader yang diputuskan oleh Konferensi Besar (KonBes) pada tahun 1979, buku tersebut relatif ringkas, dan memuat kurikulum pendidikan kader secara berjenjang yang memiliki beberapa tahapan. Sebagai organisasi kader bagi pelajar NU, IPPNU mempunyai cara kaderisasi yang memiliki beberapa jenis kaderisasi yang dilakukan dalam bentuk pelatihan. Pelatihan yang ada di IPPNU terdiri dari beberapa bagian yakni pelatihan yang bersifat formal dan non formal.

Dalam konteks NU, platform politik ditampilkan dalam politik kebangsaan, yakni visi politik yang memposisikan ke-indonesia-an di atas kepentingan golongan, baik yang berorientasi agama suku dan sejenisnya. Begitu juga dengan kader IPPNU yang merupakan penerus bangsa . Kader pelajar harus bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Dalam meteri perkaderan IPPNU juga memiliki pilar karakter dalam Islam yaitu karakter cinta dan ikhlas terhadap Allah, tanggung jawab dan mandiri, setiap kader bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan dalam perilaku manusiawi secara mandiri. Jujur dan amanah ialah karakter yang akan dibangun yang berkemampuan dan berkebiasaan memberikan yang terbaik.

IPPNU sebagai kader pelajar yang bakal jadi penerus bangsa harus bisa memberikan pelajaran atau pendidikan politik kepada generasi yang memasuki usia produktif yang dapat mewujudkan sikap cinta tanah air. Melalui perkaderan disampaikan materi yang berorientasi tentang politik kebangsaan agar tumbuh pada diri mereka rasa cinta tanah air. IPPNU memiliki peranan strategis dalam upaya memperkuat sosial politik NU di pentas nasional. Peranan itu ada pada penyiapan generasi penerus sejak dibangku sekolah atau pelajar / para kader NU muda dalam IPPNU harus bisa memahami posisinya sebagai bagian strategis dalam keluarga besar NU. IPPNU sebagai badan otonom bidang pelajar dan santri dituntut untuk mewujudkan kader-kader NU yang menjunjung tinggi nilai-nilai Aswaja.

Sebagai bagian dari otonom NU, IPPNU sudah selayaknya untuk merujuk kepada kebijakan organisasi Nahdlatul Ulama pada umumnya. Termasuk dalam output yang hendak dicapai dalam kaderisasi, karena pada hakikatnya IPPNU adalah jendela pertama pengenalan dan pelembagaan nilai NU yang berafiliasi kepada Aswaja. Sehingga sudah selayaknya ketika kompetensi kader yang diharapkan merujuk kepada kompetensi yang diharapkan oleh NU pada umumnya.

Pembahasan kaderisasi di organisasi IPPNU menjadi hal yang urgent dan selalu rutin menjadi bahan pembicaraan. Kaderisasi menjadi sel inti bagaimana IPPNU sebagai organisasi akan bertahan di tengah perkembangan global. Sebagai seorang kader NU, sudah selayaknya memiliki wawasan pengetahuan diri Nahdliyin (wawasan ke-NU-an); wawasan internal dan

kebangsaan; dan peta/arena bagi aktivis/masyarakat NU agar menjadi *fa'il* (pelaku), bukan *maf'ul* (objek).

Agar dapat menjadi subjek-subjek pembangunan, kader IPPNU haruslah memiliki kompetensi sehingga siap berkompetisi di dunia global dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Kompetensi merupakan gambaran dari sekelompok perilaku, pengetahuan/keterampilan spesifik, dan motivasi yang berkaitan dengan kesuksesan melaksanakan suatu pekerjaan, peran, dan tugas.

Ada dua faktor hubungan IPPNU dengan Nahdlatul Ulama, yaitu pertama faktor *Intern*, (dalam lingkungan NU) IPPNU merupakan badan otonomnya Nahdlatul Ulama, secara kelembagaan mempunyai kedudukan yang sama dan setara dengan badan-badan otonom yang lainnya, yang mempunyai kewajiban utama untuk melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Kedua faktor *ekstern*, di luar lingkungan NU, IPPNU ialah bagian integral dari generasi muda Indonesia yang mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya dan cita-cita perjuangan NU. Oleh karena itu Ke NU-an juga salah satu materi yang ada dalam kaderisasi IPPNU, yang dapat dijelaskan dari awal berdirinya hingga struktur organisasinya.

B. Corak Politik Islam Kebangsaan dalam Materi Perkaderan IPPNU.

Dalam kepercayaan umat Islam, Al-Quran diyakini berisi informasi hampir segala aspek kehidupan, termuk didalamnya politik. Dalam Al-Quran terdapat dalam al-Nisa' :58-59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat(4:58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (4:59)

Al-Quran maupun Hadis secara eksplisit tidak menyebutkan apakah negara yang ingin dibentuk oleh umat Islam itu berbentuk republik atau kerajaan. Demikian pula apakah sistem yang dianut disuatu negara apakah sistem presidensiil atau parlementer. Al-Quran juga tidak menyinggung tentang mekanisme kekuasaan (separation of power), pembagian kekuasaan (distribution of power), atau penyatuan kekuasaan (integration of power) antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Para founding father's dan para ulama terdahulu memilih sistem yang dijalankan di Indonesia hari ini adalah suatu kesepakatan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Tugas anak muda ialah mengawal dan menjaga negeri ini dari siapa saja yang ingin merusak negara atau ingin mengganti ideologi bangsa ini. Dalam hal ini Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama senantiasa selalu meningkatkan wawasan kebangsaan dan kenegaraan untuk meningkatkan kualitas keberpihakan kebangsaan bagi generasi muda khususnya kader IPPNU mampu memahami sila-sila yang terkandung dalam Pancasila.

Hasil konkrit dari proses ini bisa di lihat dari materi kaderisasi disetiap tingkatannya. Mulai dari Makesta, Lakmud, Lakut, dan Latpel selalu hadir materi Aswaja dan Ke-NU-an guna untuk penguatan ideologi Islam moderat, kenegaraan dan mendekatkan Islam dengan kebangsaan. Maksudnya ialah mendekati islam berdasarkan fungsi agama ini sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi alam. Islam ialah agama hukum yang mempunyai kekuatan politik. Kegunaan negara sebagai alat untuk tujuan Islam. Pada saat kegunaan dan tujuan Islam ialah kesejahteraan rakyat, berarti negara menjadi alat untuk mendapatkan tujuan tersebut. Menegaskan kembali politik kebangsaan yaitu

instrumen yang difokuskan untuk melihat keberlangsungan politik di Indonesia ialah demokrasi. Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan hak setiap warga negara, tanpa harus membedakan latar belakang, ras, suku, agama dan golongan. Menurutnya Indonesia mengalami keadaan dimana ada perubahan pandangan dalam melihat demokrasi.

Dalam aspek politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin, serta pandangan kebhinekaan yang utuh, perlu diketahui bahwa demokrasi tidak memandang perbedaan agama atau ras, namun melihat kita sebagai satu bangsa yaitu Indonesia. Politik kebangsaan ialah gagasan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, dari pada mengutamakan kekuasaan dari golongan.

Hubungan antara Islam dan Bangsa, bersifat fungsional. Yang artinya, pertama, ia mendekati Islam berdasarkan fungsi agama sebagai pandangan hidup yang menebarkan kesejahteraan bagi semesta (rahmatan lil 'alamin). Kedua, fungsi negara sebagai alat bagi tujuan Islam. Saat fungsi dan tujuan Islam ialah kesejahteraan rakyat, maka negara menjadi alat untuk mencapai tujuannya, memakai istilah kaidah al-ghayah wa al-wasail (tujuan dan cara pencapaian). Alat yang difokuskan dalam melihat keberlangsungan politik di Indonesia ialah demokrasi.

Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan hak setiap warga negara tanpa harus membedakan latar belakang, suku, ras dan agama. Salah satu yang menjadi pemicu utama dari situasi tersebut ialah hilangnya marwah politik kebangsaan, yang mulai luntur perlahan digantikan dengan politik pragmatis dengan orientasi kekuasaan, serta kepentingan segelintir

golongan yang hanya mementingkan golongan saja. Dalam aspek politik kebangsaan yang rahmatan lil alamin, serta pandangan kebhinekaan yang utuh.

Politik kebangsaan merupakan pandangan yang mementingkan persatuan dan kesatuan, daripada mengutamakan kekuasaan dari beberapa golongan. Berbicara soal politik kebangsaan secara mendasar bahwa platform ini mengutamakan visi politik yang mempunyai proposisi pada keindonesiaan, kemanusiaan dan keadilan bagi setiap golongan serta menjadi penting posisinya untuk dihidupkan dan diimplementasikan kembali

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Politik kebangsaan merupakan pandangan yang mementingkan persatuan dan kesatuan. IPPNU sebagai kader pelajar yang bakal jadi penerus bangsa harus bisa memberikan pelajaran atau pendidikan politik kepada generasi yang memasuki usia produktif yang dapat mewujudkan sikap cinta tanah air. IPPNU bisa disebut sebagai gerakan sosial anak muda pelajar puteri atau santri muslim yang memiliki semangat cinta bangsa. Keislaman dan kebangsaan sangat dipengang erat dan dijunjung tinggi. Komitmen tersebut yang dapat disebut Politik Islam Kebangsaan. Melalui perkaderan disetiap materi yang akan disampaikan materi yang menguat tentang politik kebangsaan agar menumbuhkan rasa cinta tanah air. IPPNU memiliki peranan strategis dalam upaya memperkuat sosial politik NU di pentas nasional. Peranan itu ada pada penyiapan generasi penerus sejak dibangku sekolah atau pelajar / para kader NU muda dalam IPPNU harus bisa memahami posisinya sebagai bagian strategis dalam keluarga besar NU. Hasil konkrit dari proses ini bisa kita lihat dari materi kaderisasi disetiap tingkatannya. Mulai dari Makesta, Lakmud, Lakut, dan Latpel selalu hadir materi Aswaja dan Ke-NU-an guna untuk penguatan ideologi Islam moderat, kenegaraan dan mendekatkan Islam dengan kebangsaan.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, sebagai penutup dalam skripsi ini diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. IPPNU sebagai badan otonom bidang pelajar dan santri dituntut untuk mewujudkan kader-kader NU yang menjunjung tinggi nilai-nilai Aswaja.
2. Setiap kader IPPNU harus memiliki loyalitas yang tinggi untuk mewujudkan IPPNU yang cinta tanah air, dan mengikuti setiap jenjang kaderisasi IPPNU.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal Thoha, *Jagadnya Gus Dur Pluralisme, dan Pribumisasi Islam*. (Yogyakarta, kutub 2003)
- Barton, Greg, *Biografi Gus Dur The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakarta : LKIS, 2002)
- De ,Alexis Toequeville, *Democracy in America*, Vol 10. Refrery Publishing, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Descartes, Rene, *Rene Descartes: Meditations on First philosophy: With selections from the objections and replies*. Cambrige University Press, 2013.
- Effendy, A.Choiri, dkk (ed.), *Sejuta Gelar Untuk Gus Dur* (Jakarta; Pensil-324, 2010)
- Fajrie, Mahfudlah, *Budaya Masyarakat Pesisir Wedung Jawa Tengah: Melihat Gaya Komunikasi Tradisi Pesisiran*, Mangkubumi, 2016.
- Fitzgibbons, Athol, *Adam smith's system of liberty, wealth, and virtue: The moral and political foundations of the wealth of nations*, Oxford University Press, 1995.
- Hidajad, Imam, *Teori-Teori Politik*, Malang: SETARA Press, 2011.
- Hadi, Syamsul, *KH. Abdurrahman Wahid Guru Bangsa, Bapak Pluralisme*, (Jombang : Zahra Book)

- Harahap, Syahrin, *Islam dinamis: menegakkan nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan modern di Indoensia*. PT Tiara Wacana Yogya, 1997
- Harahap, Syahrin, *Islam dan Modernitas: dari teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern*. Prenadamedia Group, 2015.
- IPPNU, PP, *Buku Pedoman Pengkaderan IPPNU*, Jakarta: PP IPPNU, 2012
- IPPNU, PP, *Hasil Keputusan Kongres IPPNU ke-XVII*, Jakarta: PP IPPNU, 2018
- IPPNU, PP, *Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Administrasi (PPOA)*, Jakarta: PP IPPNU, 2017
- Iqbal, Muhammad Hasan, *Pokok-Pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002
- Khalik, Nur Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010 Pergulatan politik dan kekuasaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
- Khuluq, Lathiful, *Tafsir Pemikiran Kebangsaan dan Keislaman Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari*, Pustaka Tebuireng, 2018.
- Madjid, Nurcholish, "Modernisasi ialah Rasionalisasi bukan Westernisasi" dalam. "Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Mizan Pustaka, 2008.
- MD, Mahfud, *Politik Islam Kebangsaan*, Yogyakarta: LKiS, 2010
- Mudatsir, Arif, *Mandan Miftahuddin, Jejak Langkah Guru Bangsa Wahid*, (Jakarta : pustaka Indoensia Satu, 2010).
- Nata, Abudin *Studi Islam Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2011

Nasution, Harun *Perkembangan Modern dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Nasution, Harun. *“Islam di Tinjau dari berbagai Aspek”*. Jakarta: UI Press, jilid I (1985).

R, Robert Palmer, *The National Idea in France Before the Revolution.*” *Journal of the History of Ideas* (1940): 95-100.

Rifai, Muhammad, *Gus Dur KH. Abdurrahman Wahid Biografi Singkat 1940-2009*, (Yogyakarta : Garasi House of Book, cet 1, 2010) h. 33

Riza, Faisal, *aktivisme Islam Kaum Urban Politisasi identitas, Mobilisasi, dan Pragmatisme Politik*, (medan, CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020).

Romahurmuziy, dkk, *Sejarah perjalanan IPPNU 1955-2000*, Jakarta : PP IPPNU, 2000, h. 41

Suhanda, Irawan(Ed), *Gus Dur Santri Par Excellence*,(Jakarta : Kompas, 2000),. H. 171

Wahid, KH Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, LKIS PELANGI AKSARA, 2010

Wahid, KH Abdurrahman, NU, *Islam dan Dmokrasi, Duta Masyarakat*, Jakarta, 2004